



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI VIII DPR RI
(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial RI; BNPB; Kemenkeu
Hari, Tanggal	: Selasa, 16 Maret 2021
Waktu	: 12.30 – 17.05 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Ketua Rapat	: H. Yandri Susanto, S.Pt./ F- PAN
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Acara	: Anggaran Penanggulangan Bencana
Anggota yang Hadir	: 35 Anggota dari 49 Anggota

PIMPINAN:

1. H. Yandri Susanto, S. Pt. (F-PAN)
2. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-PG)
3. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si (F- PDIP)
4. Laksdya. TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA.
(F-Partai Gerindra)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI PERJUANGAN

5. I Komang Koheri, S.E.
6. Paryono, S.H., M.H.
7. Ina Ammania
8. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya
9. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.
10. H. Rachmat Hidayat, SH.
11. Matindas J. Rumambi, S.Sos.
12. Drs. Samsu Niang, M.Pd.
13. H. Arwan M. Aras T., S. Kom.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

14. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH., MH.
15. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., MM.
16. Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H.
17. Muhammad Ali Ridha

FRAKSI PARTAI GERINDRA

- 18. Abdul Wachid
- 19. Drs. H. Zainul Arifin
- 20. H. Iwan Kurniawan, SH.
- 21. Drs. H. Saiful Rasyid, MM.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

- 22. Hj. Lisda Hendrajoni, SE., MM. Tr.
- 23. Dra. Delmeria
- 24. Hj. Sri Wulan, S.E., M.M.
- 25. Ach. Fadil Muzakki Syah, S. Pd. I.
- 26. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

- 27. Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.
- 28. H. Dedi Wahidi, S.Pd.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

- 29. Wastam, S.E., S.H.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

- 30. KH. Bukhori, LC., MA.
- 31. H. Iskan Qolba Lubis, MA.
- 32. Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A.
- 33. Dr. K.H. Surahman Hidayat, M.A.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

- 34. K.H. Muslich Zainal Abidin.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

- 35. H. Iip Miftahul Choiry, S.Pd.I

- Anggota yang Izin** :
- 1. Muhammad Fauzi, SE. (F- P. Golkar)
 - 2. M. Husni, S.E., M.M. (F- P. Gerindra)
 - 3. Dr. H. Jefry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M./ F- P. Gerindra
 - 4. H. Maman Imanul Haq (F- PKB)
 - 5. Drs. H. Achmad, M.Si. (F- P. Demokrat)
 - 6. H. Iip Miftahul Choiry, S.Pd.I (F- PPP)
- Undangan** :
- Menteri Sosial RI beserta jajaran.
 - BNPB beserta jajaran.
 - Kemenkeu beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

PIMPINAN KOMISI VIII/ F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Selamat Siang;

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Menteri Sosial Republik Indonesia beserta seluruh jajaran ada Pak Sekjen.

Yang saya hormati Menteri Keuangan yang diwakili oleh Ditjen anggaran beserta staf ahli bidang pengeluaran negara beserta seluruh jajaran.

Yang saya hormati Kepala BNPB Jenderal Doni Monardo beserta seluruh jajaran, Pak Sestama.

Yang saya hormati para Pimpinan Komisi VIII serta seluruh Anggota, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual.

Hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat kerja pada hari ini marilah kita selalu saja bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang telah memberikan waktu kesempatan kepada kita semua untuk mengikuti rapat kerja pada hari ini.

Sebagaimana biasanya Bapak-Ibu di Komisi VIII kalau di Komisi XI Pak Rahmat tidak dimulai dengan baca Al-Fatihah Pak kalau disini dimulai baca Al-Fatihah Pak. Oleh karena itu bagi yang beragama Islam kita baca Ummul kitab bagi yang beragama lain menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing Al-Fatihah.

Baik Bu Menteri Kepala BNPB dan Pak Dirjen beserta seluruh Anggota dan Pimpinan Komisi VIII Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan acara rapat-rapat di DPR masa persidangan IV tahun sidang 2020-2021 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi di DPR tanggal 19 Januari 2021 dan sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi VIII DPR tanggal 8 Maret 2021 maka pada hari ini Selasa 16 Maret 2021 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan agenda tentang anggaran penanggulangan bencana.

Bapak Ibu yang saya hormati.

Menurut laporan dari Sekretaris Komisi VIII pada kali ini telah hadir secara fisik memang dibatasi maksimal 20% kehadiran, ada 14 Anggota, secara virtual 22 anggota dari 8 fraksi. Oleh karena itu berdasarkan tata tertib DPR pasal 251 ayat 1 korum telah tercapai atas persetujuan Ibu Menteri dan Bapak Kepala BNPB dan Pak Dirjen serta seluruh Anggota dan Pimpinan Komisi VIII. Izinkan kami membuka rapat kerja ini dengan membacakan *Bismillahirrahmanirrahim* dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT : SETUJU)

Baik agenda kita pada hari ini yang.

1. Yang pertama, tentu pengantar dari Pimpinan Rapat.

2. Yang kedua, penjelasan dari Menteri Sosial, dilanjutkan nanti penjelasan dari Kepala BNPB dan penjelasan dari Pak Dirjen Anggaran atau yang mewakili dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Yang ketiga, tentu dari penjelasan atau paparan masing-masing dari Bu Menteri Kepala BNPB dan Dirjen Anggaran tentu akan ada respon tanya jawab dari para Anggota termasuk dari meja Pimpinan.
4. Yang keempat, kita akan menarik sebuah kesimpulan dalam rapat kerja ini;
5. dan yang kelima penutup.

Apakah agenda yang saya bacakan tadi bisa kita setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Baik kita mulai rapat pada pukul tadi 13.45 kita akhiri jam 15.30. Bagaimana Bu Menteri 15.30? Nanti kita lihat situasi dan kondisi bilamana perlu diperpanjang kita akan perpanjang sesuai dengan kondisi yang ada. Oke setuju sampai 15.30.

(RAPAT : SETUJU)

Bu Menteri yang saya hormati.
Bapak Kepala BNPB.
Pak Dirjen.
Hadirin yang berbahagia.

Rapat kerja dengan agenda pembahasan anggaran penanggulangan bencana ini sangat penting dan strategis karena membahas alokasi penanggulangan bencana yang merupakan cerminan dan perwujudan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat yang dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana termuat dalam Pasal 27 Ayat 2 berbunyi sebagaimana berikut "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*" Pasal ini memberikan pengertian bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan agar setiap warga negara dapat hidup layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia Indonesia. Sebagai bagian dari hak asasi manusia atau dengan kata lain pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dari ancaman bencana.

Mengingat bahwa tujuan di bentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu dengan yang dimiliki oleh Komisi VIII DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 Pasal 20 Ayat 1 bahwa "*Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki fungsi legislasi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan*" Pentingnya mengurai apa yang menjadi masalah aspek anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana saat ini.

Pembahasan kebijakan anggaran bencana ini *urgent* mengingat saat ini di tengah bencana nasional pandemi Covid-19 di berbagai daerah juga terdapat berbagai macam bencana karena kalau menurut Pak Doni, Bu Mensos Indonesia adalah supermarketnya bencana Bu, semua macam bencana ada di Indonesia. Oleh karena itu rapat kerja ini harus terfokus pada kebijakan besaran anggaran penanggulangan bencana dan sangat penting untuk kita lakukan pembahasan.

Yang pertama Komisi VIII DPR RI saat ini sedang menginisiasi perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jadi inisiatif DPR kita sedang berjalan pembahasannya yaitu revisi Undang-undang nomor 24 tahun 2007 yang insyaallah kita akan selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang di dalam pokok peraturan memuat peraturan mengenai pengalokasian anggaran penanggulangan bencana yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini dengan merumuskan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dengan mencantumkan persentase sebesar paling sedikit 2% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Selain itu dalam rancangan Undang-undang yang mengatur tentang pentingnya dana abadi penanggulangan bencana. Hal ini dimaksudkan sebagai *mandatory spending* dan untuk mendorong pemerintah daerah tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat. Jadi ini Pak Dirjen Anggaran sudah keliling Indonesia hampir semua kabupaten/kota dan provinsi itu tidak mencantumkan anggaran penanggulangan bencana Pak. Oleh karena itu perlu *mandatory spending* di RUU ini kami cantumkan sebesar 2% sehingga ketika Undang-undang disahkan maka wajib bagi kabupaten, kota, dan Provinsi untuk mengalokasikan anggaran bencana yang.

Kedua pentingnya akuntabilitas penggunaan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai yang setiap tahunnya sangat besar. Pada tahun 2020 dana siap pakai mencapai Rp12.000.000.000.000,-. Yang ketiga alokasi dana perlindungan dan jaminan sosial. Tahun 2020 mencapai Rp46.219.528.775.000,-.

Kedua gambaran alokasi anggaran penanggulangan tersebut baru ada di 2 Kementerian lembaga yaitu BNPB dan Kemensos belum termasuk anggaran penanggulangan bencana yang ada di kementerian lembaga seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kementerian lembaga yang lainnya.

Bu Menteri, Kepala BNPB, dan Pak Dirjen Anggaran yang saya hormati.
Para Hadirin yang berbahagia.

Atas dasar pertimbangan tersebut dan merujuk penjelasan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan dan anggaran khususnya anggaran penanggulangan bencana pada rapat kerja hari ini Komisi VIII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan alokasi anggaran penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana? Yang saya katakan tadi dari Sabang sampai Merauke semua jenis bencana ada apalagi di tengah pandemi sekarang bencana non alam.
2. Bagaimana mekanisme pengeluaran dana siap pakai dan pemanfaatannya dalam penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini?
3. Bagaimana kebijakan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dengan mencantumkan prosentase sebesar paling sedikit 2% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, serta pentingnya dana abadi penanggulangan bencana diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana?

Maka kami undang Pak Dirjen Anggaran ini menyangkut sekali lagi kami sampaikan bahwa Komisi VIII bersama pemerintah dalam hal ini Menteri Sosial pihak terkait Kepala BNPB dan kementerian lainnya sedang membahas rancangan Undang-undang bencana Pak Rahmat dan kami mencantumkan disitu pentingnya angka 2% dari APBN dan APBD, nah ini penting pendapat dari Kementerian Keuangan.

Saya kira itu pengantar dari kami mudah-mudahan rapat kerja atau rapat gabungan kali ini bisa menghasilkan sesuatu hal yang bisa kita jadikan rujukan untuk merampungkan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Menteri Bu Risma untuk menyampaikan paparannya waktu dan tempat kami persilakan.

MENTERI SOSIAL (TRI RISMAHARINI):

Terima kasih Bapak ketua.

Yang saya hormati Ketua Komisi VIII DPR RI.
Yang saya hormati para Wakil ketua Komisi VIII DPR RI.
Yang saya hormati para Anggota Komisi VIII DPR RI.
Menteri keuangan atau yang mewakili dan Kepala BNPB.
Hadirin undangan yang berbahagia.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang

Dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan sidang Bapak dan Ibu anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana pokok bahasan rapat kerja pada hari ini kami akan menyampaikan materi sesuai dengan agenda tersebut di atas sesuai dengan

tugas Kementerian Sosial dalam penanganan bencana yang pertama adalah sesuai Keppres nomor 46 tahun 2015 bahwa tugas Kementerian Sosial adalah menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Yang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial dimana disampaikan bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana alam dan atau korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi, di dalam pasal 5 dan seterusnya.

Kemudian tugas Kementerian Sosial dalam penanganan bencana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi dan seterusnya kemudian di dalam PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu sumber daya manusia peralatan dan logistik sesuai pasal 25; pemenuhan kebutuhan dasar sesuai pasal 53; dan perlindungan terhadap kelompok rentan pasal 53; dan rehabilitasi pada wilayah pasca bencana, pemulihan sosial psikologis, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial dalam ruang lingkup penanganan konflik meliputi pencegahan konflik penelitian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai pasal 4.

Kemudian kalau menilik SK Kepala BNPB Nomor 173 Tahun 2014 ada klaster-klaster yang membagi ada klaster kesehatan dan seterusnya kemudian ada klaster logistik dan klaster pengungsian dan perlindungan. Dimana klaster pengungsian dan perlindungan itu koordinatornya adalah direktur perlindungan sosial korban bencana alam di Kementerian sosial, wakil koordinator adalah asisten operasi Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian tugasnya adalah penyiapan dapur umum pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, tempat pengungsian, keamanan, manajemen pengungsian dan penyiapan hunian sementara, perlindungan kelompok rentan, pengelolaan informasi di bidang pengungsian, dan perlindungan yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam penanggulangan bencana adalah yaitu pra bencana dimana kita menyiapkan sistem penanggulangan bencana. Contohnya misalkan kalau kemarin kita membagi sebelumnya itu membagi kami punya *buffer stok* itu di seluruh provinsi hingga saat ini. Yang berikutnya ada gudang utama ada 3 gudang di Bekasi, kemudian di Makassar, Palembang.

Nah kemudian dari analisa itu kemarin saya berpikir masih terlalu jauh. Contohnya saat kita menghadapi kita harus menghadapi di Mamuju kami mengirim, bencana, rencananya itu sesuai jadwal 9 jam. Tapi kemudian karena ada longsor sehingga itu menjadi 15 jam. Sehingga kenapa kemudian kami baru, meskipun malam kami sudah membuat dapur umum namun kami bisa melayani penuh itu baru besok paginya. Karena pagi ini bencana saya dan Pak Doni kesana -siangnya-, kemudian malamnya kami membuat dapur umum dan persiapan untuk pengungsian.

Selanjutnya kemudian, kenapa kami mempunyai 41 Balai di Indonesia dan 5 Badiklit (Badan Pendidikan dan Penelitian) ada 5 jadi total ada 46. Saat ini kami sudah menyebar, kita sebar *buffer stock* itu ada di masing-masing 46 lokasi tersebut. Jadi yang dulu sementara 3 saat ini sudah kami memiliki 46. Itu yang kita lakukan. Kemudian penguatan SDM yaitu Tagana dan Pelopor perdamaian. Jadi ini kami secara rutin. Merekalah yang sebetulnya secara aktif dan Tagana dan Pelopor Perdamaian, serta TKSK, dan PKH yang secara aktif mereka melakukan baik penolongan korban, membantu BNPB, maupun sampai pembagian pemukiman, dan penghunian sementara. Itu adalah mereka-mereka ini dan mereka tidak semuanya harus ada dari daerah itu. Jadi kadang seperti kemarin di Mamuju mereka datang dari kabupaten-kabupaten di sekitar Mamuju bahkan ada yang dari Makassar dari Palu dan sebagainya.

Kemudian berikutnya yang kita sedang siapkan adalah pembentukan Kampung Siaga Bencana dan penguatan kearifan lokal untuk bagaimana penanganan bencana. Ini penting menurut saya karena seperti kejadian Tsunami di Aceh saat mestinya, saat itu di Aceh di kampung Simeulue Aceh mestinya merekalah yang korbannya terbanyak. Tapi karena ada kearifan lokal sehingga saat mereka terjadi gempa maka mereka langsung lari ke atas sehingga saat tsunami yang mestinya secara teori merekalah korban terbanyak tapi mereka justru yang paling sedikit hanya 3 jiwa saat itu.

Kemudian berikutnya, jadi ini kenapa kita hidupkan kembali penguatan kearifan lokal. Kemudian yang berikutnya adalah tanggap darurat. Jadi ini yang seperti tadi saya sampaikan dapur umum kemudian layanan dukungan psikososial. Jadi ini terkait karena kami juga akan nanti revisi karena ada anggaran di balai-balai kami. Karena saat ini misalkan di Balai Makassar itu hanya balai untuk anak, sedangkan saat terjadi Mamuju kami harus mengirim petugas kami dari Solo yang ada memang dia menangani kalau ada patah tulang, kemudian psikologisnya. Itu sehingga kita kerahkan. Oleh karena itu konsep balai itu yang sebelumnya sudah saya sampaikan kami akan rubah bahwa setiap balai adalah bisa menangani oleh macam-macam berbagai permasalahan sosial.

Kemudian berikutnya adalah peran SDM Tagana ini karena sangat membantu kita kemudian pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan sosial lainnya termasuk kelompok rentan, perempuan, dan anak, dan lansia. Kemudian juga pasca bencana Jadi kami memberikan santunan kepada ahli waris kemudian jaminan hidup isi hunian dan bahan bangunan rumah. Ada beberapa yang kami tidak bisa lakukan karena keterbatasan anggaran kami. Sehingga yang bisa kami berikan adalah santunan untuk ahli waris. Sedangkan lainnya kami belum bisa lakukan.

Kemudian yang berikutnya adalah layanan dukungan psikososial yang tadi kami sampaikan. Jadi biasanya kami langsung kirim dan kami lakukan penguatan-penguatan termasuk kepada anak-anak. Kemudian untuk rujukan *shelter* sekolah dan lain-lain. Nah berikutnya adalah yang ini coba kita sampaikan yang sudah kita lakukan adalah foto-foto ini. Kemudian banjir di Kabupaten Halmahera.

Kalau melihat undang-undang dan tupoksi kami itu sebetulnya ada anggaran tadi rekondisi yang ini kita belum bisa lakukan. Kami coba mendekati dengan anggaran rutilahu. Nah ini yang coba saya apa namanya putar-putar uangnya yang ada disitu supaya kami bisa melayani. Contohnya misalkan saat kami datang ke Halmahera Utara mereka sampaikan, "Kami tidak butuh bantuan-bantuan semua ini, tapi rumah kami setiap tahun kami terkena ini" Jadi mereka minta di relokasi. Sedangkan anggaran di kami tidak ada.

Kemudian juga banjir di Bekasi kejadian banjir Bekasi itu *impact*-nya adalah di Karawang. Kalau dikatakan itu bencana nasional di Bekasi padahal *impact*-nya di Karawang juga dan kami membantu. Namun karena memang Karawang tidak apa namanya tidak secara eksplisit bahwa dia bencana nasional tapi kami tetap membantu karena kondisinya memang kami lihat pengungsi ada di sepanjang jalan di jalan raya di sepanjang Karawang. Jadi seperti itu kira-kira kondisinya. Jadi kenapa kemudian *buffer* stok kami dengan kondisi itu menipis.

Oleh karena itu, kami kemarin juga menangani konflik di Intan Jaya. Jadi kami mengirim makanan dan berbagai kebutuhan untuk warga yang mengungsi karena konflik di Intan Jaya. Permasalahannya juga terutama untuk daerah Papua, kami kemarin pada waktu kejadian di Paniai itu kami tidak memiliki akses sehingga kami kirim barang itu. Karena kalau dikirim dari Jayapura sebetulnya secara peta itu dekat tapi karena tidak ada fasilitas angkutan untuk bisa ke sana sehingga kami kirim dari Jakarta-Bekasi kemudian kita naikkan Hercules, kemudian turun di Timika, dari Timika kemudian kita angkut menggunakan pesawat *charter*. Kami *me-charter* pesawat 2 kali penerbangan nah itu yang kemudian kenapa anggaran untuk apa namanya? Angkutan pengiriman itu sudah habis saat ini di kementerian.

Kemudian karena itu ini target-target RKP 2021 yang kita tangani. Namun tadi yang karena tidak mungkin kita kemudian membiarkan pengungsi yang ada di Karawang yang ia terkena di Bekasi kemudian kita membiarkan kita juga tidak mungkin. Jadi karena itu kemudian kita tangani bersama.

Nah rincian anggaran penanggulangan bencana itu adalah Anggaran awal itu Rp282.315.000.000,- Kemudian ada *refocusing* Rp50.000.000.000,- kita ambil. Kemudian anggaran akhir adalah Rp232.000.000.000,- Kemudian ini fasilitas pembinaan masyarakat, jadi ada tali asih untuk Tagana. Kemudian kompetensi Tagana dan ini yang tadi kami rencanakan. Pembentukan kampung siaga bencana kemudian untuk dukungan manajemen. Jadi dukungan manajemen ini kita gunakan untuk administrasi.

Kemudian bantuan kebencanaan jadi ini yang on call 5,9. Kemudian untuk bantuan pemakanan, kemudian untuk peralatan evakuasi dan kendaraan siap siaga bencana. Seperti kejadian di Mamuju itu di *extent* hampir 1 bulan ya Pak Doni sehingga itu juga harusnya kita 2 minggu tapi kemudian di-*extent* menjadi satu bulan sehingga kita juga memerlukan untuk *buffer stock* dan penangan-penangan makanan.

Kemudian yang berikutnya adalah dana dekonsentrasi ini yang diserahkan ke daerah untuk di provinsi kurang lebih Rp27.000.000.000,- dibagi di seluruh di provinsi. Kemudian dari hasil ini, kemudian yang kita

lakukan adalah jadi anggaran Rp232.000.000.000,- realisasinya Rp19.3Miliar dan kemudian sisa Rp212.000.000.000,- Nah permasalahannya Rp212.000.000.000,- ini adalah Rp10.000.000.000,- untuk apa tadi untuk Tagana itu tahapan penambahan Ini Tagana ini dapatnya 250 sama tambah Rp50.000,- Pak. Mereka kerjanya 24 jam.

Dan tadi saya sampaikan jadi kita tidak bisa melihat misalkan Mamuju yang bencana kemudian yang bekerja itu Tagana Mamuju bukan seperti itu. Karena waktunya lama sehingga mereka satu minggu kita ganti dari kabupaten lain dan itu memang butuh banyak sehingga tidak apa namanya tidak seluruhnya. Karena itu saya kemarin mengusulkan ditambah Rp50.000,- jadi tambah Rp5.9Miliar.

Kemudian nah ini yang kita lakukan adalah jadi kami mempunyai anggaran ini tidak ada datanya 300 (untuk pembangunan Poltekke) itu Rp319.000.000.000,- Nah ini untuk Poltekkes Rp319.000.000.000,- sekian Kemudian itu kita tidak membangun hanya kami gunakan kurang lebih Rp5.000.000.000,- untuk pagar. Rp277.000.000.000,- itu kita gunakan untuk kekurangan anggaran PT. Pos kerjasama dengan PT. Pos untuk penyaluran BST. Jadi kemarin hanya ada 2 bulan jadi kurang 2 bulan karena diberikan Januari sampai dengan April (bantuan sosial tunai). Itu ternyata hanya tersedia 2 bulan sehingga yang 2 bulan kami ambil dari pembangunan Poltekkes ini kurang lebih Rp277.000.000.000,- kemudian sisanya Rp5.000.000.000,- untuk bangun pagar untuk pengamanan aset karena kita khawatir kalau tidak kita pageri nanti apa namanya hilang batas-batasnya. Tetap kita tapi hanya Rp5.000.000.000,-. Kemudian sisanya Rp37.000.000.000,- itu kita perbantukan untuk bencana. Karena terus terang kami juga khawatir kalau cadangan kami hanya tinggal Rp212.000.000.000,-.

Kemudian berikutnya ini kami juga ngambil dari DTKS Rp100.000.000.000,- untuk kami alokasikan di bencana juga karena apa harus kita putar-putar karena kalau tidak kami khawatir anggarannya tidak mencukupi kemudian kami tidak bisa melakukan tugas-tugas kami.

Kemudian berikutnya adalah anggaran untuk penanggulangan bencana sosial. Jadi ini yang kita lakukan jadi untuk kalau untuk konflik sosial dan sebagainya itu kita berikan kepada masyarakat kemudian berikutnya adalah ini tadi rencana realokasi. Jadi yang Rp5.000.000.000,- di atas tolong ini Rp5.000.000.000,- untuk tetap untuk aset pengamanan aset Poltekkes kemudian yang berikutnya yang sekitar 37 kami ambil untuk bencana. Kemudian kami mengambil dari DTKS Rp100.000.000.000,- untuk bencana dan tadi yang kami sampaikan Rp277.000.000.000,- itu untuk PT Pos untuk penyaluran Bansos tunai BLT.

Jadi ini yang coba kita lakukan Kemudian dari Dirjen Resos ini yang balai-balai ini. Karena saat ini Balai memang kami minta turun dulu dan kami menangani pengaduan ini sekarang ini sangat-sangat apa namanya sangat masif sehingga kami mengelola dari belanja modal 264 untuk pembangunan balai. Kemudian kita lakukan kurang lebih Rp82.000.000.000,- itu untuk tadi kami sampaikan membantu membuat untuk balai-balai ini bisa menjadi tempat untuk membantu masyarakat termasuk membuat untuk kursi roda. Kursi untuk bantuan *cerebralpalsy* dan kemudian kursi roda untuk

hidrocephalus. Kami akan membuat kurang lebih 600 unit kemudian 50 unit roda 3 untuk apa usaha keluarga berkebutuhan khusus. Jadi ini kami ambil dari belanja modal kemudian kita bagi ini kemudian sisanya tetap untuk belanja modal.

Demikian kira-kira dan kami juga mohon izin ada anggaran di bagian Biro Umum itu Rp18.000.000.000,- untuk pembangunan arsip itu kami tunda karena mungkin kami bisa gunakan dengan anggaran yang 58 sedangkan yang Rp18.000.000.000,- Itu akan kami gunakan untuk pengadaan ambulans di 41 balai. Jadi nanti tiap balai itu ada penambahan ambulans sehingga kalau masyarakat membutuhkan maka bisa menggunakan ambulans tadi. Selain itu kami juga membelikan truk untuk bencana. Jadi pengiriman barang karena kemarin waktu kejadian di Bekasi saya menunggu 2 jam tidak datang-datang ternyata truknya mogok jadi karena itu kita akan bantu dari anggaran Biro Umum supaya anggaran di apa bencana itu bisa lebih optimal.

Itu Saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan saya akhiri.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia atas penjelasannya. Artinya memang uangnya kurang terus Bu ya dan saya sampaikan dari meja Pimpinan para Anggota yang terhormat kita belum pernah membahas refocusing anggaran dengan Bu Menteri Insyaallah minggu depan Bu. Jal-hal yang perlu kita geser atau penambahan pengurangan karena lalu lintas anggaran itu harus tetap ada persetujuan dari DPR dan mungkin sebelum ada pertanyaan nanti dari Anggota Pimpinan sebenarnya kami ingin fokus tadi kira-kira dengan wewenang yang ada di Kementerian Sosial itu berapa butuh anggaran untuk bencana ini. Sehingga apa benar inisiatif DPR itu mencantumkan angka 2% sudah layak atau tidak karena dalam undang-undang nanti kami akan bagi wewenang Kementerian Sosial bagaimana BNPB bagaimana dan yang pasti tidak saling meniadakan dan tidak ada mengecilkan. Kami ingin dua-duanya besar dua-duanya tampil untuk garda terdepan dalam menanggulangi sesuai dengan kewenangannya. Mungkin Pak Sekjen atau Pak Dirjen bisa difokuskan kira-kira dengan *mandatory spending* 2% itu masuk akal tidak kurang atau kelebihan begitu ya?

Sekali lagi terima kasih Bu Menteri atas penjelasannya dan kami tentu apresiasi langkah-langkah dari Bu Risma kami juga melihat di lapangan untuk mengantisipasi atau menanggulangi kemiskinan. Baik kami persilakan selanjutnya Kepala BNPB Pak Jenderal Doni Monardo silakan.

KEPALA BNPB:

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom.
Om Swastiastu.
Namo buddhaya.
Salam kebajikan.

Yang terhormat pimpinan rapat Ketua Komisi VIII
Dan para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI
Beserta dengan segenap Anggota Komisi VIII DPR RI
Yang terhormat Ibu Menteri Sosial.
Yang saya hormati Menteri Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Anggaran
Dan para Dirjen sekalian yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul disini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rapat kerja antara Menteri Sosial, Menteri Keuangan dan Kepala BNPB dengan Pimpinan dan para Anggota Komisi VIII DPR RI.

Para Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati.

Yang dapat kami sampaikan bahwa rapat kerja ini diselenggarakan sesuai dengan undangan dari Wakil Ketua DPR RI Korkesra Nomor PW03098 DPR RI III 2021 tanggal 10 Maret 2021 perihal undangan rapat yang akan membahas mengenai anggaran penanggulangan bencana.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati.

Dapat kami sampaikan bahwa secara umum tren bencana setiap tahun semakin meningkat. Namun pada tahun 2020 kejadian bencana alam mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi muncul kejadian bencana non alam yaitu pandemi Covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional pada tahun 2020 tercatat 2.951 kejadian bencana lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 3.814. Sampai dengan pertengahan bulan Maret tahun 2020 ini tercatat 8.18 kejadian bencana, bencana hidrometeorologi yang mendominasi antara lain banjir menempati urutan pertama diikuti puting beliung, tanah longsor. Bencana juga menimbulkan penduduk yang terdampak dan mengungsi mencapai 4.12Juta jiwa merenggut 275 jiwa meninggal dunia serta 12.412 jiwa yang luka-luka.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati.

Kami juga laporkan bahwa Pagu anggaran rutin BNPB beberapa tahun belakang ini menunjukkan kecenderungan yang menurun pada tahun 2015 Pagu anggaran BNPB sebesar Rp1,661Triliun Kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp1.653Triliun pada tahun 2017 turun menjadi Rp1.084Triliun atau menurun 34% tahun 2018 turun kembali menjadi Rp748.000.000.000,- turun 30% sedangkan tahun 2019 turun menjadi Rp614.000.000.000,- yaitu turun 17,9% dan pada tahun 2020 sebesar Rp430.000.000.000,- atau turun 26,6% dan pada tahun 2021 sebesar Rp481.000.000.000,- rata-rata penurunan sebesar 22,08% setiap tahunnya.

Sedangkan kejadian bencana menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya sehingga terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketersediaan sumber dana yang terbatas diharapkan ke depan anggaran rutin BNPB dapat ditambah mengingat kebutuhan yang meningkat rencana untuk penguatan kelembagaan yaitu penambahan 1 Eseloin I, 5 Eselon II dan 7 UPT Logistik kemudian penataan jabatan fungsional bidang kebencanaan, penguatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan literasi kebencanaan.

Selain dana rutin BNPB juga mendapatkan dana siap pakai atau DSP yang dianggarkan dalam Dipa BNPB pada awal tahun sejak tahun 2020 DSP tersedia pada Dipa awal sebesar Rp250.000.000.000,- mengingat banyaknya kejadian bencana pada awal tahun maka perlu adanya peningkatan DSP yang dialokasikan pada Dipa di awal tahun menjadi Rp500.000.000.000,- setiap tahunnya selain DSP yang sudah dianggarkan pada awal tahun pada tahun berjalan BNPB juga dapat mengusulkan tambahan DSP kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan bencana yang terjadi.

Pada tahun 2020 tambahan DSP yang diperoleh merupakan yang paling besar karena selain untuk penanganan bencana alam juga untuk penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 dari total DSP tahun 2020 sebesar Rp12.173Triliun terserap sebesar Rp11.282Triliun yang terdiri dari Rp2.058Triliun untuk penanganan bencana alam dan Rp9.223Triliun untuk penanganan Covid-19.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati.

Kami sampaikan penggunaan dana siap pakai pada tahun 2021 dari total DSP pada DIPA awal sebesar Rp250Miliar telah disalurkan sebesar Rp178.5Miliar yang digunakan untuk penanganan bencana banjir, longsor, puting beliung gempa bumi Covid dan operasional masih terdapat estimasi kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak penanganan bencana sebesar Rp209.000.000.000,-.

Berkaitan dengan hal tersebut kami juga menyampaikan usulan tambahan dana siap pakai untuk penanganan bencana alam sebesar Rp2.000.000.000.000,- usulan tambahan dana tersebut belum termasuk kebutuhan untuk tunggakan pembiayaan penanganan karhutla pada tahun lalu tahun 2020 sebesar Rp1.3Triliun yang masih dalam proses review di BPKP.

Sesuai dengan PMK nomor 208/PMK02/2020 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2021 sehingga kami menyarankan untuk adanya pertimbangan dilakukan revisi PMK nomor 127 PMK 02 2020 tentang tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran pada bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja lainnya BA9998.08 pada Pasal 10 Ayat.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Izin Pimpinan, pada tunggakan karhutla itu apa maksudnya Pak?

KETUA RAPAT:

Nanti Pak Rudi saya persilakan dulu Pak Doni jangan dipotong dulu Pak.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Biar mendetail juga Pak.

KETUA RAPAT:

Tidak, saya Pimpinan Pak. Lanjut Pak Doni.

KEPALA BNPB:

Kami izin lanjutkan Pak. Bahwa usulan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan mohon dipertimbangkan perlu atau tidaknya dilampiri hasil verifikasi BPKP atau mungkin diberikannya dukungan anggaran 50% dari usulan. Karena bagaimanapun kami sangat tergantung dari BPKP sebelum adanya review dari BPKP tentunya kami juga belum berani untuk mendatangi usulan. Tetapi apabila terlambat seperti yang sekarang terjadi sudah masuk bulan Maret kebakaran sudah mulai berjalan di beberapa provinsi seperti halnya Riau Kalimantan Barat dan juga Aceh namun terkendala karena para pengusaha atau vendor yang mengelola helikopter *water bombing* ini belum mendapatkan pembayaran. Oleh karenanya usulan kami ini mohon kiranya bisa jadi pertimbangan tetap harus ada verifikasi dari BPKP karena itulah pedoman kami dalam mengajukan usulan anggaran termasuk proses pembayaran.

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 kami juga telah menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp5.2Triliun kepada Menteri Keuangan melalui surat Kepala BNPB nomor B76KA BNPB PR040103 2021 tanggal 4 Maret 2021 yang akan digunakan antara lain untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 pembiayaan tenaga *tracing* sampai dengan 1 Maret 2021 dan selanjutnya kegiatan *tracing-testing* serta penyajian alat kesehatan akan dilaksanakan oleh Kementerian kesehatan per 1 April 2021.

Selanjutnya kami sampaikan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2021 sebesar Rp2.92Triliun yang akan dipergunakan untuk:

1. Penanganan pasca gempa di Sulawesi Barat sebesar Rp1.32Triliun.
2. Penanganan pasca banjir di Kalimantan Selatan sebesar Rp541.2Miliar.
3. Usulan rehap rekon tahap 1 tahun 2021 untuk 56 pemerintah daerah sebesar Rp562.68Miliar usulan rehap rekon tahap 2 tahun 2021 untuk 50 pemerintah daerah sebesar Rp500.000.000.000,-

Bapak Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati.

Selanjutnya kami laporkan BNPB dan BMKG telah memenuhi persyaratan bank dunia untuk mendapatkan pendanaan kegiatan Indonesia *Disaster Resiliency Initiatives Project* atau kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiap siagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana alam dengan durasi mulai tahun 2020 sampai tahun 2024. Target kegiatan ini adalah daerah rawan Tsunami pada 25 Provinsi, 237 kabupaten/kota dan 5.743 desa dan kelurahan.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang kami hormati.

Sebagai penutup kami sampaikan tantangan ke depan dalam penanganan bencana di Indonesia yaitu frekuensi kejadian bencana masih cukup tinggi setiap tahunnya sehingga memerlukan penanganan yang cepat tepat dan terkoordinasi dengan baik untuk mengurangi risiko dampak buruk akibat bencana. Diperlukan peningkatan upaya-upaya prabencana berkualitas yang perlu dukungan pembiayaan secara memadai.

Selain itu kiranya perlu adanya peraturan yang mendukung implementasi penanganan bencana dengan cepat dan tepat dengan tetap menjaga akuntabilitas dan kinerja serta manfaat bagi rakyat kita masih menghadapi pandemi Covid masih berlangsung dan belum tahu kapan akan berakhir. Oleh karenanya Pada kesempatan ini selaku Kepala BNPB dan juga kepala satuan tugas mengingatkan kita semua untuk tetap patuh kepada protokol kesehatan termasuk mereka yang telah di vaksin karena efikasi vaksin masih 65%. Artinya masih ada 30% mereka yang di vaksin mungkin tidak efektif atau belum efektif sehingga protokol 3M menggunakan masker jaga jarak dan mencuci tangan masih menjadi program prioritas pemerintah.

Demikian Pimpinan yang dapat kami laporkan mengenai anggaran penanggulangan bencana apabila ada hal-hal yang perlu pendalaman kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom.

Om Shanti-shanti om.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Kepala BNPB Pak Jenderal Doni Monardo sudah menguraikan dari gambarannya. Memang begitu besar kebutuhan terhadap kebencanaan ini walaupun tadi kalau kita trend dari biaya rutin BNPB dari 2015 sampai 2021 turun Pak ya dari 1.63 tinggal Rp481Miliar hari ini tapi dana siap pakainya naik terus ya. Sama pertanyaan dari meja Pimpinan apakah dengan mencantumkan 2% itu layak atau tidak sehingga kita ini tidak coba-coba Pak mengatasi kebencanaan geser sana geser sini. kKirim surat lagi, ya kalau disetujui? Mungkin kita artinya perlu benar-benar serius dengan undang-undang yang akan kita sahkan ini Pak.

Sekali lagi, terima kasih. Nanti Pak Rudi Hartono kita perdalam pasti banyak sekali yang mau kita perdalam. Karena kita ingin melahirkan sebuah undang-undang yang mendekati Paripurna walaupun tidak sempurna. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Jenderal anggaran Kementerian Keuangan Bapak Insinyur Isa Rachmatarwata kami persilakan.

ISA RACHMATAWARTA (KEMENTERIAN KEUANGAN):

Bismillahirrohmanirohim.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi VIII
Ibu Bapak-bapak Wakil Ketua Komisi VIII
Ibu dan Bapak Anggota Komisi VIII
Ibu Menteri Sosial Bapak Kepala BNPB
Dan Hadirin yang saya hormati

Pertama mohon maaf karena baru juga dan juga mendadak kami tidak secara khusus menyiapkan paparan Bapak. Tapi kami sudah memahami maksud dari rapat ini dan menyiapkan beberapa catatan yang nanti seandainya diperlukan kami akan bisa susulkan sebagai sekaligus sebagai respon dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pimpinan maupun Anggota dari Komisi VIII yang kami hormati.

Bapak Pimpinan, Ibu/Bapak Anggota Komisi VIII yang kami hormati.

Sebagaimana kita ketahui bencana ini adalah sesuatu kejadian yang tidak bisa diprediksi dan kita juga tidak tahu kapan akan terjadinya dan seberapa besar intensitasnya. Karena itu menganggarkan untuk suatu bencana adalah sesuatu yang sangat *tricky* dan sangat menantang untuk kita semua dalam hal tersebut kami menguatkan protokol-protokol untuk bisa merespons bencana tersebut dengan lebih baik.

Karena itu sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Menteri Sosial maupun Bapak Kepala BNPB kesiapan kita untuk merespons bencana dengan kemudahan untuk menyediakan dana siap pakai dan sebagainya itu

sebetulnya menjadi kunci daripada kita kemudian menganggarkan terlalu besar atau terlalu kecil di depan yang kemudian menjadi fix dan tidak bisa kita lakukan *adjustment*.

Sebagaimana Ibu Bapak maklum, negara kita juga bukan negara yang kemudian mempunyai kelonggaran luar biasa di dalam menyusun anggaran sehingga kemudian kita juga tidak bisa kemudian menganggarkan terlalu besar untuk kemudian -mohon maaf- tidak digunakan sebetulnya. Kita harus bersyukur kalau untuk bencana ini kita tidak menggunakannya sebetulnya tentu kita semua berharap demikian tapi kalau kemudian kita memiliki anggaran yang besar kemudian kita tidak menggunakannya ini juga menjadi satu problem karena beberapa kebutuhan lain menjadi terganggu karena itu sebagaimana praktek yang selama ini diterapkan melalui APBN sebenarnya anggaran penanganan bencana ini dialokasikan tidak hanya memang pada Kementerian Sosial dan BNPB. Tapi juga ada pada beberapa Kementerian lain seperti PUPR bahkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada. Dan juga di daerah-daerah ini juga ada sebetulnya alokasi untuk bisa digunakan setiap saat merespons terhadap berbagai bencana anggaran dana siap pakai juga disiapkan dan memang dialokasikan pada tahun anggaran yang berjalan pada saat bencana itu memang benar-benar terjadi.

Untuk tahun 2021 memang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial maupun kepala Bapak Kepala BNPB memang di BNPB telah dialokasikan dana siap pakai awalnya Rp250.000.000.000,- yang dapat digunakan di awal tahun 2021 bila sudah terjadi bencana dan nampaknya tadi sudah mau berapa banyak digunakan di berbagai tempat

Selanjutnya sebagai antisipasi bila bencana yang terjadi di waktu-waktu yang lain sepanjang tahun tentunya di dalam APBN 2021 juga ada anggaran cadangan bencana yang dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk anggaran penanganan bencana alam ini setiap tahun selalu meningkat sejalan juga tadi dengan peningkatan frekuensi ataupun intensitas dari dampak bencana dan karenanya memang kita perlu membangun suatu sistem yang lebih baik tadi disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial maupun Bapak Kepala BNPB bahwa merespons bencana perlu cepat dan kita memang idealnya tadi Bapak Pimpinan juga menyampaikan jangan kita sibuk terlalu lama geser menggeser anggaran dan sebagainya jadi memang kita memang perlu membangun memikirkan dan membangun suatu sistem yang lebih responsif terhadap bencana tersebut.

Nah ini tentunya kita sependapat sampai dengan batas-batas tertentu kita mulai membangun sistem dimana kita bisa menyiapkan pendanaan penanganan bencana alam yang lebih memberikan *assurance* dan juga *sustainability* di dalam penanganan bencana itu sendiri namun tentunya kita ingin mencari sistem pendanaan yang pertama efektif tentunya yang kedua juga efisien. Karena itu di dalam pandangan kami membangun suatu model-model yang sesuai dengan perkembangan masa kini seperti *pooling fund* kemudian nanti sistem asuransi reasuransi dan sebagainya itu lebih memberikan semacam di satu sisi *assurance* tapi juga fleksibilitas yang lebih baik daripada kemudian kita mengalokasikan secara tetap dan fix 1 anggaran di setiap tahunnya, yang tentunya ini bisa jadi kurang bisa jadi juga berlebihan untuk merespons bencana pada tahun yang bersangkutan.

Ini yang yang mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut Bapak Pimpinan Ibu Bapak Wakil Ketua disini dan juga Ibu Bapak Anggota yang tentunya ini yang memerlukan memang diskusi-diskusi yang pada tataran konsep yang bisa dibicarakan disini ataupun nanti di tingkat detail tentu dalam bentuk FGD dan sebagainya.

Pemerintah telah menyiapkan skema tersebut dan regulasi perencanaan penanggulangan bencana melalui belanja kementerian/lembaga belanja transfer, serta upaya penggunaan pengelolaan dana bersama yang tadi kami sebutkan atau *pooling fund* bencana ini yang sedang disiapkan peraturan Presiden untuk pelaksanaannya dan kalau kemudian nanti RUU penanggulangan bencana kita lanjutkan pembahasannya dimasa sidang berikut ini tentunya hal tersebut bisa menjadi bagian dari diskusi ini juga sudah masuk di dalam usulan pemerintah yang disampaikan dalam bentuk tim kepada DPR.

Saya rasa sementara itu dan kami siap untuk merespons pertanyaan-pertanyaan Selanjutnya kami kembalikan kepada bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Isa Rahmad Dirjen Anggaran dari Kementerian Keuangan. Kuncinya apa? Tadi Pak fleksibilitas ya? Jadi kalau terlalu besar tidak dipakai jadi mengganggu fiskal secara keseluruhan. Tapi kalau terkecil juga seolah kita tidak peduli dengan bencana. Saya kira ini redaksinya harus dicari sebaik mungkin Pak di Undang-Undang Penanggulangan Bencana nanti. Tapi kalau untuk APBD mungkin menyebut angka 2% itu bisa kelihatannya bisa. Karena faktanya memang selama ini tidak pernah APBD itu menganggarkan untuk bencana Pak. Mungkin perlu juga Ketua Panja untuk beberapa Gubernur atau kepala daerah diundang pendapatnya atau diminta pendapatnya sebelum dicantumkan di dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

Baik Bapak Ibu dari Menteri Sosial sudah kita dengarkan dari Kepala BNPB sudah kita dengarkan, dari Kementerian Keuangan jelaskan terhadap agenda hari ini yaitu tentang dana kebencanaan. Kita kami persilakan kepada para Anggota untuk memberikan respons tanggapan saran terhadap paparan dari mitra kita tadi dari PDI P siapa yang mau mewakili Pak? Nanti kita putar lagi ya kalau ini Pak Paryono dari Golkar Bu Endang dari Gerindra Pak Jefri atau Pak Husni? Tidak ada Pak Jeffry Pak Husni? Tidak biasa tidak mau ngomong ini. Oke lanjut dulu dari Nasdem Pak Rudi? Kemudian dari PKB, ada Ibu Anisa Syakur atau Pak Dedi? Nggak datang kosong ya? Dari Demokrat Pak Wastam ya? Kemudian dari PKS Pak Iskan Qolba. Kemudian dari PAN daring ini Pak Asli Chaidir. Yang dari PPP Pak Muslich ya.

Coba nanti kita lihat perkembangan dulu. Kami sampaikan pertanyaan maksimal 5 menit berbicara kalau yang sudah ditanyakan oleh penanya sebelumnya sebanyak tidak diulangi lagi untuk efisiensi waktu. Kami persilakan Pak Paryono dari PDI P.

F-PDI PERJUANGAN (PARYONO S.H., M.H.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII dan juga Bu Menteri Sosial serta jajarannya.

Kepala BNPB beserta jajarannya.

Sebelumnya perkenalkan karena saya anggota baru mohon maaf ada Dirjen Anggaran warna atau yang mewakili perkenalkan hari kedua ini. Saya mengikuti rapat di Komisi VIII karena sebelumnya saya di Komisi II nama saya Paryono dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil 4 Jateng.

Langsung saja tadi sudah disampaikan dari Bu Menteri Pak Doni dan juga Dirjen Keuangan beserta jajaran. Tadi arahan dari Pimpinan Komisi VIII tentang bagaimana skema anggaran yang tepat untuk anggaran bencana ini? Jadi memang kalau dalam penyusunan ini kami perlu sampaikan dalam anggaran untuk persiapan bencana selama ini masing-masing daerah juga menyiapkan dana tak terduga untuk persiapan kalau ada anggaran bencana. Maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya tadi yang disampaikan Pak Ketua untuk bisa mengundang para kepala daerah sehingga bisa menyelaraskan karena kepala daerah ini kan ujung tombak juga dengan penanganan setiap ada bencana di daerah-daerah. Karena sering terjadi miskomunikasi antara daerah dan pusat di dalam penanganan-penanganan bencana.

Dari soal besar kecilnya memang kalau yang namanya bencana ini memang ya tak terduga jadi besar dan kecilnya. Memang kita susah untuk menentukan besarnya. Tetapi ini penting dan wajib karena apa negara harus selalu dituntut hadir di setiap kejadian-kejadian sehingga untuk besar dan kecil nya ini memang mau tidak mau kita harus menyiapkan yang secukupnya. Kalau soal untuk bencana yang kayak gunung meletus, banjir, dan sebagainya dari sesuatu yang disampaikan oleh gunung meletus, banjir dan sebagainya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Risma dan juga Pak Doni. Kalau pra bencana disiapkan matang jauh sebelumnya sehingga nanti untuk penanganan-penanganan lanjutan seperti tanggap darurat dan pasca bencana ini bisa sedikit diterawanglah tapi harus matang dulu di pra bencana ini betul-betul disiapkan secara matang.

Kalau bencana ini seperti Covid ya semua kan kita tidak tahu. Sehingga mungkin anggaran sebesar ini. Kita tidak tahu bagaimana kita skemanya ya nanti kita harus bisa melihat pengalaman yang sudah kita alami dalam Covid ini untuk memandang kejadian yang akan datang bagaimana kita bisa tidak kesulitan dalam penanganan hanya karena soal kesulitan anggaran lain yang memang sebetulnya memang memberatkan. Tetap kita mempersiapkan sedini mungkin sehingga setiap kejadian bencana yang sifatnya kayak tadi dibidang Bu Risma rutin itu karena kita belum ada rencana kita bisa dengan analisa-analisa atau yang namanya Covid ini tidak tahu nanti ada kejadian apa lagi. Itu saja yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf.

*Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Paryono dari PDI P kami persilahkan ibu Endang Maria Astuti dari Golkar.

F- P. GOLKAR (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., SH., MH.):

Terima kasih Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VIII Bu Mensos yang baru. Selamat untuk Bu Risma hari ini Pak Doni beserta seluruh jajaran. Pak Hartono laras dan juga perwakilan dari Keuangan. Sebelumnya karena Bu Mensos mungkin belum mengenal Pak Dirjen dari keuangan sebagaimana Undang-Undang MD3 perkenalkan saya Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Tengah 4. Kebetulan 1 Dapil dengannya barusan saja ngomong dari PDIP.

Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh rekan saya Mas Paryono, itu sebetulnya betul adanya. Tetapi saya lebih ingin sedikit memberikan penegasan kepada Kementerian Sosial. Jadi kalau inikan sudah arah ke refocusing, sementara nanti kita tentunya akan membahas tersendiri tetapi ini membahas anggaran yang berkenaan dengan bencana alam. Bagaimana nanti penganggarannya?

Bu Menteri, sejauh ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 itu menurut kita saat membahas sangat ideal sekali begitu. Cuma, kondisi di era pandemi ini belum begitu di *breakdown*, jadi terkesan bahwa kehadiran negara belum maksimal terhadap masyarakat. Yaitu dari sisi pemberdayaan sosial dan perlindungan. Kenapa saya bicara seperti itu? Persoalannya adalah karena database. Masyarakat yang mestinya mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan ternyata ini belum mendapatkan itu. Jadi *breakdown* nanti di RKA KL ini bagaimana? Kita ingin mendapatkan penguatan dengan hadirnya undang-undang tersebut. Jadi implementasi di tatanan bawah ini memang harus betul-betul ada

Kemudian dari tugas Kementerian Sosial di dalam penanganan yaitu Undang-Undang 24 Tahun 2007 karena ini kan mengenai bencana perumusan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ini sebetulnya sudah bagus ya efektif, efisien, dan sebagainya. Tetapi ketika mengarahnya adalah untuk pengkoordinasian pelaksanaan ini karena berkaitan dengan yang PP Nomor 21 Tahun 2008 Ibu. Yaitu tentang rehabilitasi tentang perlindungan terhadap kelompok rentan. Pemenuhan kebutuhan dasar. Ini ternyata, kita tidak tahu apakah itu sebagian ulah oknum, kita tidak tahu. Tapi ini harus dipastikan bahwa kehadiran terhadap mereka itu tidak lepas begitu. Jangan sampai nanti menjadi hal yang merasa bahwa negara tidak hadir terhadap mereka.

Kemudian yang terakhir adalah rehabilitasi pasca bencana dalam pemulihan dan resolusi konflik sosial. Ini saya kira untuk programnya

termasuk yang harus mendapat penguatan. Tetapi kalau kita lihat tahun kemarin ini sangat sedikit sekali dan hampir tidak ada program itu turun ke bawah yang berkaitan dengan kearifan lokal. Jadi ini perlu dihidupkan saya mendukung program Ibu perlu dihidupkan sehingga dihidupkan ini bukan hanya satu dua tiga karena seluruh Indonesia banyak. Jadi memang itu harus kearifan lokal berkaitan dengan penanganan bencana seperti itu sehingga masyarakat merasakan kehadirannya.

Jadi yang perlu kita dukung adalah dua hal itu untuk Ibu kemudian bagaimana nanti kearifan lokal itu merasa masyarakat merasakan kehadiran dari Kementerian Sosial dan kita ingin melihat sejauh mana hasil dari Badiklit tadi Bu bagaimana pemetaan dari Badiklit di dalam penanganan bencana karena ini nanti akan berkaitan dengan program dan juga masalah keuangan.

Tinggal satu mengenai yang BNPB yaitu kita harapkan kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Doni ini berkaitan dengan apa yang di awal itu memang okelah. Sudah kita sudah mengerti ketika terjadi bencana tetapi pada saat rehabilitasi sosial ini yang harus ditangani BNPB dengan anggaran yang ini kecil tentunya kurang memadai itu saja pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Bu Endang Maria Astuti dari Golkar kami persilakan dari Nasdem Pak Rudi Hartono.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Terima kasih Ketua

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.

Yang saya Hormati Ibu Menteri Sosial Pak Doni.

Pak Dirjen Anggaran orang terkaya di Indonesia kemarin Pak sekarang sudah diganti sudah dicabut kekayaannya. Tapi katanya lebih mantap disini. Pertama Pak Pimpinan tadi saya interupsi bukan apa biasa memang karena saya mau bertanya ini beliau ngomong tidak jelas harus Ketua izin tanya apa penjelasan tadi saya mau nanya nih sekarang. Saya awang-awang ini Ketua itu makanya jadi pertama saya ingin tanya Pak Doni dulu disini kan Pak Doni mengundang kita ini Menteri Keuangan disini ada rencana usulan tambahan anggaran.

Jadi saya tadi malam melihat membaca begitu mengamati ada beberapa item anggaran Pak Doni dari nomor 1 sampai 6 di jenis bencana itu jadi tadi saya itu agak samar saya. Makanya interupsi, saya ingin tahu itu Pak ada disini Karhutla Bapak anggarkan Rp1.080.000.000.000,- itu saya ingin tahu saya ingin dengar mungkin Pak Menteri Keuangan harus tahu kenapa sebesar ini Pak dianggarkan? Sementara ini kebakarannya dimana tadi dijelaskan Bapak. Sekarang ini prioritas Indonesia adalah kebakaran. Artinya

kalau dari survei itu dana banjir harus dibesari kenapa ini dana tadi kebakaran hutan.

Terus tadi samar-samar saya dengar vendor-vendor gitu Bapak bilang belum dibayar, uang apa ini apa namanya apa Bapak jelaskan pekerjaan helikopter itu yang menyiram itu ya? Yang diperiksa oleh BPK tidak diterima begitu Pak ini. Makanya saya interupsi saya tidak jelas tadi jadi tidak dibayar dan sampai tahun ini terutang begitu ya Pak. Interaksi sebentar Ketua begitu Pak begitu maksudnya interaktif Pak.

KEPALA BNPB:

Izin Bapak Pimpinan kami jawab langsung jadi Indonesia ini luas sekali Pak tiap daerah itu memiliki risiko ancaman yang berbeda pada waktu bersamaan ada daerah yang kena banjir tetapi ada juga daerah yang kekeringan dan menimbulkan kebakaran. Contoh sederhana Pak Pulau Kalimantan Kalsel itu banjir Pak baru mulai surut tetapi Kalbar itu sudah mulai kebakaran. Gubernur Kalbar sudah menentukan status darurat. Kemudian Riau itu juga sudah mulai kebakaran pada bulan Februari yang lalu Pak.

Kemudian turun hujan beberapa jam sehingga apinya bisa padam. Kemudian pada saat bersamaan juga wilayah Aceh terutama pantai barat bagian selatan juga mengalami kebakaran hutan dan lahan jadi negara kita yang begitu luas ini Pak dalam waktu bersamaan terjadi perbedaan cuaca tidak bisa dihindari

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Baik paham saya Pak. Tadi yang saya mau saya interupsi itu penjelasan dari Bapak. Jadi begini Pak apakah sebesar ini anggaran untuk menyiram hutan itu sampai Rp1.080.000.000.000,- begitu sementara banjir yang kita lihat sepanjang tahun tanah longsor banyak itu yang saya ingin tahu makanya BPKP disini dia mungkin ini tidak percaya Pak. Kalau logika berpikir ya ini cerita kita saja makanya tindakan begitu Pak, karena saya terlalu besar Pak. Kalau ini sekarang musim hujan Bapak tadi bilang musim hujan mati apinya paling juga berapa kali muter sudah selesai Pak tapi ini Rp1.000.000.000.000.000,- Pak

Kalau podomoro suruh buat kota disana suruh pindahkan korban kebakaran beres jadi kota. Kalau saya lihat ya Rp1.000.000.000.000.000,- besar sementara Bapak lihat banjir hanya dialokasikan Rp100.000.000.000,- gempa bumi yang kita ini Ring of Fire kata Bapak itu Rp100.000.000.000,- begitu Covid sendiri juga berapa ini begitu Pak.

Jadi saya lihat logika saja Pak jadi jangan nanti kita menduga-duga ada permainan BPKP juga tidak setuju gitu logika Pak begitu nanti dibelakang-belakang hari Bapak diadakan. Saya ditanya wartawan ada data Pak Rudi dikasih Pak dan kami kirim lah. Jadi akhirnya kita nanti saling tidak baik belakangnya itu Pak saya ingatkan dalam hal Bapak meminta penambahan dana ini begitu.

Kemudian Pak tentang dana BNPB, BNPB ini selalu kalau ada korban banjir gempa bumi memberikannya ke tingkat 2 Pak ke BNPB tingkat II sementara tinggal 2 itu punya Walikota punyanya Bupati mereka punya anggaran DAK sendiri bagaimana itu cara mekanismenya coba Bapak dia punya DAK diurus Pak Paryono tadi bilang ya dikasih dianggarkan sendiri Rp3.000.000.000,- untuk daerah dia Bapak kasih juga dari pusat siapa yang tahu Pak itu sampai tidak coba dikaji Pak kalau-kalau Menteri Sosial juga lihat juga Bu kalau kita ke kalau Ibu dulu Walikota ya ke dinas Ibu ya tidak sanksi sekarang Ibu kasih ke tingkat II nyampai tidak begitu Pak.

Jadi saya melihat sendiri mengalami yang Bapak bilang sudah salurkan Rp500.000.000,- juta mana orangnya tidak kebagian malah dikasih masker Pak sudah kebanjiran, tutup mulut Pak ya? Saya, Pak Doni kebanjiran uangnya sudah di drop kata Anggota Pak Doni Doni 500 3 minggu lagi orangnya datang korbannya tidak ada Pak kami tidak ada dikasih Indomie sebungkuspun tidak katanya.

Tapi baik hati Pak Doni dikasih masker saya bilang tutup mulut kalian saya bilang ya dia haduh Pak, kami butuh makan bukan butuh masker katanya Pak. Nah itu, itu satu contoh Pak jangan salah sasaran begitu kasih Pak jadi ke tingkat II siapa itu yang bagi Pak saya mau marah-marah sama siapa nih saya tanya sama direktur Bapak. Kita adukan saja yuk ke aparat hukum masa cerita seperti itu makanya harus tata kelolanya harus dirubah Pak Doni siapa yang ke bawah kalau di Aceh dulu ada NGO Pak. Tsunami dulu mereka tidak pakai pemerintah bagus jalan tol rumah semua sampai sekarang Pak begitu itu yang utama kalau ke Bu Menteri begini. Bu Menteri inikan tadi saya lihat berkasnya saya baca hanya ada bahasa relokasi antar unit program perlu persetujuan DPR RI. Saya tidak paham saya dengar Pak Ketua ini harus khusus kan begitu sekarang tidak ada cerita penambahan apa hanya Polteksos ini kan ada 11 tujuan Dewan ini mungkin tersendiri Pimpinan

Itu Pak saya hanya konsep ke Pak Doni ini saya menyaksikan Triliunan ini yang tahun 2020 juga begitu itu alokasinya saya sanksi Pak saya bukan nuduh Pak tapi saya menduga ini kurang akuntabilitas kurang Pak, itu dulu saya Pimpinan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Rudi Hartono dari Nasdem kami persilakan Pak Wastam. Kita lanjut dulu kalau begitu Iskan Qolba dari PKS.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
Alhamdulillah washolatu wassalamu ala rasulillah.*

Yang kami hormati Bu Menteri dan kepala BNPB.

Saya tadi kita ini kan sedang membahas anggaran dalam konteks kebencanaan yang berhubungan dengan proses pembahasan RUU kebencanaan. Saya tadi berharap seharusnya itu Kementerian Keuangan sudah memberikan desain kira-kira begini loh bencana kita ke depan begini yang sudah kita habiskan. Ke depannya begini begitu dong harus secara konseptual gitu inikan kita ini urusan negara ini tapi itu tidak saya dapatkan. Jadi semuanya laporan rutin saya lihat baik dari Kementerian Sosial BNPB seharusnya begini ke depan trennya kita butuh anggaran sekian banyak tapi anggaran kita cuma sekian. Apa jalan keluarnya?

Itu tadi yang dibilang tadi mungkin kita buat sistem ke depan itu sistem yang disebut dengan asuransi iya kan asuransi itu kan mengurangi bencana kalau orang kehilangan mobil Rp500.000.000,- harga mobilnya dia cukup bayar Rp10.000.000,- dia sudah aman begitu nah konsep-konsep ini yang kita tunggu sebetulnya supaya nanti angka-angka yang ada di sampaikan oleh Menteri Kementerian Keuangan atau BNPB itu bisa kita buat dalam bentuk kata-kata di dalam Undang-undang tapi ini tidak saya dapatkan begitu. Jadi kecewa juga saya datang hari ini mewakili Menteri itu Pak Ketua yang pertama jadi tolong ini di perhatikan kita inikan kerja secara sistemik ya.

Yang kedua khusus Ibu Risma Ibu Risma saya lihat agak kurus ini mungkin banyak kesana kemari banyak turun jembatan kemana tapi Bu kita yakin Kementerian Sosial ini kebanyakan anggaran itu kan desain sebetulnya Bu seperti di BKH ditempat lain perbaikan perbaikan Kemensos itu bagus tapi maksud saya jangan semua keputusan itu di Ibu Menteri. Kan seperti di perusahaan itu kan cabang ini dia punya wewenang sekian mengeluarkan apa kredit cabang ini, sekian. Jadi kalau semuanya ke meja Ibu bisa terhalang juga nanti bantuan-bantuan sosial ini.

Jadi harus membuat, mereposisi Eselon I apa yang boleh di pelantikan Eselon II Eselon III, tidak harus ke Ibu semua. Ini usulan saja Bu ya supaya nanti Kemensos ini lebih-lebih canggih. Tadi pagi saya ada di PKS ada namanya aspirasi masyarakat. Jadi korda bantuan sosial sembako se-Indonesia itu mereka mengeluh Bu. Inikan pelaksana pembagian sembako mereka inikan ujung tombak dari Kementerian Sosial tiba-tiba hak mereka yang asasi tidak terpenuhi ini mereka sudah 3 bulan tidak dikasih ini mereka apa namanya hak-hak mereka ini bagaimana Bu.

Coba Ibu cek di Eselon I, II Ibu belum lagi hal-hal yang dan keluhan mereka itu kalau korda umpamanya di daerah Banten ada satu daerah itu harus berjalan 50 km di daerah Sumatera daerah NTB. Jadi sistem memberikan apa namanya hak-hak mereka itu harus juga didasarkan kepada tugas yang diberikan kepada dia tidak seorang yang punya kewajiban sedikit ini banyak tiba-tiba dia sama karena sangat sulit kalau dia harus pergi 50 km berjalan. Cuma dia dapat apa namanya Rp3.000.000.000,- umpamanya tapi harus itu menurut daya ini harus dibedakan antara di Jawa dan lain Jawa itu memang harus ada kebijakan Ibu itu yang kedua.

Yang ketiga yang terakhir Pak Ketua, saya banyak dikirim oleh dari kalangan LSM khusus untuk BNPB, banyak ternyata alat-alat yang di kirim alat-alat PCR yang dikirim ke rumah sakit itu tidak berdasarkan analisa yang bagus ya. Jadi catatan mereka itu sebanyak 78 rumah sakit di 29 Provinsi

mengembalikan lebih dari 468.624 unit alat PCR dari bulan Mei sampai September 2020 analisisnya itu adalah ada 4 hal pertama tidak adanya identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya di setiap rumah sakit jadi rumah sakit itu butuh apa yang dikasih itu apa tidak nyambung itu yang pertama. Yang kedua penunjukan perusahaan tidak didasarkan pada pengalaman sebagian besar mereka tidak bukan bergerak di bidang non medis ini juga berarti juga berarti alat yang diberikan ini tidak sesuai dengan spesifikasi medis ini salah satu bentuk diduga bentuk dari kerugian negara.

Yang ketiga tidak ada pengecekan barang secara teliti saat serah terima barang sehingga terdapat barang yang mendekati masa kadaluarsa jadi itu Pak Ketua ingin berharap ini mungkin Kementerian Keuangan Membuat konsep ya jadi kondisi bencana apalagi sekarang ada bencana Covid jadi harus kita desain lagi bencana kedepan bukan hanya bencana yang sifatnya seperti yang terjadi selama ini sudah ada Covid.

Nah seperti berapa sih kebutuhan uang kita ke depan supaya itu kita desain dan kita sebut dalam bentuk undang-undang tadi, itu saja Pak ketua terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Barakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Iskan Qolba dari PKS dari Pak Wastam kami persilakan dari Demokrat bersiap-siap dari virtual Ibu Anisah Syakur

F- P. DEMOKRAT (WASTAM, S.E., S.H.):

Terima kasih Ketua

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Komisi VIII bersama Anggotanya.

Yang saya hormati Ibu Menteri Sosial Bu Risma.

Ketua BNPB Bapak Doni Monardo.

Dan Dirjen Anggaran Keuangan.

Saya hanya menyampaikan saja pada setiap ada bencana di setiap daerah ternyata gagap untuk menangani bencana itu sendiri, padahal bencana itu datangnya seringkali rutin dan kebiasaan kalau ada banjir ya biasanya datang pada saat musim hujan dan kekeringan juga pada saat biasanya kekurangan air atau kebakaran di beberapa tempat tertentu. Tapi memang seringkali kedodoran untuk menangani hal ini.

Saya berharap untuk Kepala BNPB dan Ibu Mensos bahwa untuk tenaga Tagana-nya itu ditingkatkan kemampuannya terus untuk Taruna siaga bencana. Saya setuju sekali kalau anggarannya dinaikkan karena mereka benar-benar berada di ujung tombak yang anggarannya sangat kecil kalau tidak salah saya dengar itu hanya ratusan ribu, padahal mereka dari gunung

dari tempat terpencil lari-lari atau naik motor untuk memberikan informasi terhadap terjadinya bencana. Sehingga ini sangat penting sekali supaya apa supaya tidak gagap menangani setiap bencana karena mereka sudah terlatih dan dana untuk mereka juga cukup layak untuk jalan mengejar untuk memberikan pelaporan pelaporan terhadap pemangku kebijakan.

Jadi saya sangat berharap sekali untuk tenaga Tagana ini jangan dinaikkan kecil Bu kalau bisa dinaikkan lagi lah jangan dinaikkan Rp50.000,- kalau bisa ditingkatkan lagi dibandingkan kita dibandingkan kita menangani pemulihan ini akan jauh lebih efektif untuk mengurangi biaya-biaya yang keluar karena kalau biaya pemulihannya ini jauh lebih besar dibandingkan biaya preventifnya dan saya berharap untuk PPPT ini juga jangan sering melakukan rotasi terhadap tenaga kerja karena kalau sering rotasi nanti penangannya susah karena yang datang belum tentu ahli yang sudah berada di tempatnya kredit tanpa sekarang.

Saya berharap seperti itu saja Bu dan saya mohon untuk ini juga sering berkoordinasi dengan kepala daerah di tempat masing-masing. Contoh kami kayak kemarin jujur saja di tempat kami kebanjiran kita meminta bantuan untuk perahu karet betul juga yang dibilang tadi bahwa yang datang masker jadi pada saat pada waktu itu saya butuhkan prahu karet padahal saya minta dua supaya di datangkan perahu karet tapi yang datang memang ada kebutuhan lain. Tapi masker tetap dikirim padahal di tempat kami masker itu masih melimpah di kabupaten kami masker itu masih melimpah. Tapi tetep saja didatangkan masker padahal masker itu sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi karena memang masih banyak. Seperti itu saja dari kami Pak terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Barakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Wastam dari Demokrat. Anggota yang saya meanggilnya Fraksi dulu ya tadi belum ada perwakilan dari PKB, kebetulan PKB ini yang datang hanya Bu Anisah Syakur dari virtual silakan Bu Anisah.

F- PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag.):

Assalamualaikum Warahmatullah Barakatuh

Terima kasih atas waktunya.

Yang saya hormati Bapak Kepala BNPB.

Yang saya hormati dari Menteri Keuangan.

Dan juga Pimpinan rapat beserta Komisi VIII yang saya hormati juga.

Ada beberapa pandangan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama kepada Ibu Menteri Sosial saya memberikan apresiasi apa yang bisa dilakukan namun apa yang sudah dilakukan dalam penanganan bencana saat

ini jangan sampai mengabaikan terhadap hal yang sudah menjadi rutinitas tanggung jawab daripada Kementerian Sosial. Itu yang pertama.

Yang kedua kepada BNPB Saya melihat tadi di *slide* nomor 15 ada biaya penanggulangan Covid itu nilainya cukup tinggi sekitar Rp5.2Triliun. Padahal kita tahu penanganan Covid saat ini Alhamdulillah kasusnya terus menurun dan di saat bersamaan vaksinasi juga terus berjalan dengan baik. Maka yang ingin kami tanyakan apakah dalam penanganan termasuk penanganan kesehatan yang disitu ada Rp2Triliun apakah ini menjadi tanggung jawab BNPB atau bukankah itu dikerjasamakan atau tanggung jawab Kementerian Kesehatan? itu yang pertama.

Yang kedua anggaran operasional rumah sakit darurat Wisma Atlet itu juga apa menjadi beban BNPB atautkah beban bersama antara BNPB dengan kesehatan karena saya melihat anggarannya ada di BNPB itu sekitar Rp850.000.000.000,-.

Dan yang ketiga yang perlu juga dicermati anggaran humas atau komunikasi publik yang sangat besar hingga mendekati Triliun padahal masih banyak cara untuk komunikasi publik yang bisa sangat murah melalui internet, media sosial, dan literasi buku atau yang lain-lain bisa sangat hemat. Apakah tidak sebaiknya hal itu sebagian diperuntukkan bencana yang sekarang ini masih menunda dimana-mana? Saya kira ini perlu kami minta penjelasan terima kasih .

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Tidak biasanya ini singkat Ibu biasanya panjang tanyanya. Kembali ke anggota ke Ibu Amania setelah itu Pak Arwan Aras bersiap-siap Ibu Ida Syahidah.

F- PDI PERJUANGAN (INA AMMANIA):

Terima kasih.

Bismillahirrohmanirohim.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Yang terhormat Ketua dan para Anggota Komisi VIII.

Yang terhormat Ibu Menteri.

Pak Doni Kepala BNPB Kementerian yang di dan pada hari ini diwakilkan oleh Dirjen Anggaran beserta jajarannya.

Ketika kita bicara bencana alam atau non alam kita harus menyikapi permasalahannya untuk menyelesaikan dan bagaimana pencegahannya. Dalam hari ini kita rapat untuk anggaran penanggulangan bencana oleh sebab itu seyogyanya kita Komisi VIII dan juga para mitra daripada Komisi

meng-*inventory* permasalahan yang ada. Tadi Pak Doni sudah mengatakan Indonesia itu sangat luas betul Pak sangat luas ada gunungnya sampai kita tidak bisa menghitung ada lautnya ada apa namanya patahan-patahan yang selalu mendatangkan bencana.

Oleh sebab itu dalam anggaran penanggulangan bencana ini kita meng-*inventory* permasalahannya nah di situ nanti akan kita tahu berapa besar biaya yang harus Komisi VIII menyetujuinya. Dan tadi juga dikatakan bahwa setiap daerah mempunyai anggaran tak terduga katanya Pak Paryono memang betul. Nah disitu apakah bisa disikapi disinkronisasikan ketika daerah mempunyai dana-dana yang tak terduga ini sehingga tidak apa namanya tumpang tindih sehingga saling mengklaim tadi sudah dikatakan oleh Pak Doni juga saya menyikapi Pak tahun 2020 bencana alam cenderung menurun adanya. Bencana non alam yang dinyatakan sebagai bencana nasional betul kita semua merasakan Pak ya.

Nah disini saya ingin menanyakan kepada Pak Doni berkaitan dengan Covid-19 yang sekarang sudah dimulai program vaksinasi apa yang bisa BNPB sampaikan kepada kami mengenai progres hingga sekarang? Karena mobil PCR juga antigen banyakan yang sudah tidak terpakai lagi dulu saya beli rapid test sampai berapa dus untuk di Dapil tidak tahunya sekarang tidak terpakai Pak rapid test padahal itu uang pun Dapil saya uang receh ternyata sekarang tidak terpakai.

Nah yang kedua Pak mohon Kami diberikan juga laporan DSP dana siapa pakai 2020 yang terealisasi hal ini penting untuk gambaran tahun 2021 ini yang sedang berjalan memang DSP ini dominan apa namanya di BNPB tetapi Kementerian Sosial dan BNPB sama-sama menanggulangi kebencanaan.

Oleh sebab itu saya mohon juga Kementerian Sosial dapat mengakses tentunya ini juga dengan merubah undang-undang karena sudah di dalam Undang-undang tidak bisa Kementerian Sosial untuk membuka.

Oleh sebab itu saya mengharap aturan harus dirubah oleh Dirjen Anggaran supaya Kementerian Sosial juga karena saya tahu sebagai Kementerian baru tetapkan beliau berpengalaman sebagai walikota suka kemana-mana sehingga perlu dengan dana yang bisa untuk membantu masyarakat. Karena sekarang Kementerian Sosial Bu Risma tidak lagi satu daerah tetapi dari Sabang sampai Merauke sehingga perlu dukungan DSP tersebut, sehingga disinkronisasikan dengan undang-undang ini nanti bisa bekerja sama menanggulangi bencana.

Dan yang berikutnya tadi Bu Risma saya juga sudah bangga perubahan Kemensos penanggulangan bencana sudah sangat baik karena dimana-mana ada juga apa namanya dapur umum dan juga pendampingan mengungsi anak suatu waktu pernah kami mengikuti Bu Menteri ke anak dalam tentunya ini perlu kita sikapi Kalau umpama anak dalam dan daerah-daerah terpencil tidak kita beli ruang itu akan menjadi bencana baru oleh sebab itu nanti mungkin kita minta mendengarkan daripada Bu menteri bagaimana menyikapi daerah-daerah yang terpencil.

Nah kami mendukung rencana optimalisasi Bu realokasi anggaran bencana alam yang akan dilakukan pada tahun 2021. Tadi Ibu mengatakan bahwa Taruna tanggap bencana dinaikkan Rp50.000,- sebagai relawan yang selalu hadir ketika terjadi bencana sangat perlu diukur didukung sebagai program Ibu. Oleh sebab itu kita sebagai kemanusiaan sesuai dengan sila Pancasila karena beliau juga bekerja 24 jam daripada kita apa namanya mengobatkan lebih baik kita preventif Bu. Jadi saya mohon mungkin itu saya mendukung kalau umpama ada kenaikan daripada anggaran.

Nah itu tadi Pak yang saya garis bawahi untuk dana DSP di halaman 5 ini mungkin dengan kesimpulan dapat dimasukkan supaya bisa berketetapan begitu terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Ina Amania atas pertanyaannya dan beberapa sarannya kami persilakan Pak Arwan Aras dari PDIP Sulawesi Barat ini cdaerah Mamuju ini Bu.

F- PDI PERJUANGAN (H. ARWAN M. ARAS T., S. Kom.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII, Wakil pimpinan Komisi; serta seluruh yang Anggota yang hadir pada hari ini maupun yang mengikuti rapat dengan virtual.

Yang saya hormati Menteri Sosial Ibu Risma.

Yang saya hormati Kepala BNPB Doni Monardo bersama staf.

Yang saya hormati Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Melalui forum terhormat ini saya selaku Anggota DPR RI dapil Sulawesi Barat mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada Pak Doni dan Menteri Sosial Ibu Risma yang pada tanggal 15 Januari 2021 kemarin dengan sangat cepat sampai ke Sulawesi Barat. Saya mewakili masyarakat Sulawesi Barat Pak Ibu sangat berterima kasih sekali.

Namun di samping itu setelah ibu bapak pulang ternyata masalahnya bukan cuman gempa saja. Banyak fakta di lapangan memang koordinasi yang tidak ada saya pun sebagai Anggota DPRD disana bingung mau kemana ke Kementerian Sosial berbeda ke BNPB. Pertama yang dibawa BPBD beda lagi. Jadi mungkin Pak Ketua di terkait dengan Undang-Undang penanggulangan bencana nanti memang perlu dijabarkan siapa yang bertanggung jawab di koordinasi dan teknis supaya ini ke bawah ini 1 Pak jangan sampai di bawah mencar-mencar semua.

Kemudian tak kalah pentingnya lagi saya setuju Pak Ketua Ini pengalaman Pak Ketua tentu anggaran BNPB dinaikkan seperti permintaan yaitu di angka 500 saya setuju Pak Ketua saya mengalami Pak ketua bagaimana di Sulbar itu sangat membutuhkan tapi perlu juga penjelasannya bagaimana nanti Pak Doni menjelaskannya pemakaiannya.

Kemudian Pak Doni saya bertanya tentang kebencanaan Sulawesi Barat ini RSL Mamuju terus DTH Kabupaten Mamuju DTH Kabupaten Majene DTH Kabupaten Mamasa dan gempa Sulbar D3 apa DSP-nya ini sudah terpakai terutama untuk RSL Mamuju kalau belum terpakai Pak atau sudah terpakai saya mohon dikasih rinciannya kalau Pak Doni sebentar tidak bisa menjawab semua mungkin saya bisa dikasih tertulis saja Pak ini sebagai bentuk pertanggung jawaban apa pengawasan juga dari kami.

Mungkin itu aja terima kasih Pak Menteri dan Pak Doni sudah sangat sangat membantu masyarakat Sulawesi Barat terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Arwan Aras dari PDIP Dapil Sulawesi Barat yang baru saja kena gempa semoga masyarakat disana cepat pulih kembali dan tidak terkena bencana kembali dari Golkar Dapil Gorontalo.

F- P. GOLKAR (Dra. Hj. IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE, M.H.);

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore

Yang saya hormati Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia
Juga Kepala BNPB Pak Doni Pak Dirjen
Dan Pimpinan Komisi VIII serta seluruh Anggota

Untuk BNPB terkait dana siap pakai Pak yang dalam rencana usulan tambahan anggaran DSP itu penanganan darurat bencana alam di tahun 2021 dalam kaitannya jenis bencana-bencana tanah longsor banjir kemudian puting beliung sebesar Rp390.000.000.000,- ini bagaimana BNPB menentukan kriteria lokasi yang menjadi objek anggaran? Apakah berdasarkan potensi ancaman atau berdasarkan peristiwa yang sudah terjadi di tahun 2021 ini?

Karena kalau kita melihat dari potensi kebetulan saya dari Dapil Gorontalo juga memiliki ancaman yang sama terlebih lagi Provinsi Gorontalo dikelilingi oleh tiga patahan yang aktif di sebelah utara adalah Sulawesi sebelah timur adalah sesar Gorontalo yang membelah Provinsi Gorontalo menjadi dua bagian yaitu melewati Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan berakhir di Kabupaten Gorontalo Utara.

Kemudian juga Gorontalo itu juga memerlukan anggaran-anggaran non fisik Pak karena apa? Bisa di saat tidak ada bencana ini tidak ada kegiatan

yang namanya forum penanggulangan risiko bencana dimana pada tahun 2019 itu selalu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap kabupaten/kota.

Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain yang namanya Destana, Destana ini selama tidak ada bencana tidak ada kegiatan Pak, padahal itu sangat diperlukan pelatihan-pelatihan untuk penanggulangan bencana. Kemudian juga ada Destana-destana yang ada di kabupaten kota itu juga perlu dipelihara Pak dalam arti ada tali kasih ada honor ya seperti Tagana walaupun sedikit tetapi terlihat terpelihara. Untuk itulah kami juga mohon kepada Ibu Menteri seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman Tagana sekiranya juga ada penambahan dari 300 menjadi lebih sedikit untuk kelangsungan hidup mereka.

Kemudian untuk Pak Doni juga lewat Pak Lili juga kiranya dihidupkan kembali forum penanggulangan resiko bencana yang ada di provinsi kabupaten dan kota kebetulan saya adalah ketua forumnya Pak. Suka ditanya oleh teman-teman kegiatannya apa kalau tidak ada bencana tidak ada kegiatan sedangkan itu sangat diperlukan kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya satuan pendidikan aman bencana yang ada di sekolah-sekolah itu juga sangat perlu Pak karena apa pada saat anak-anak sekolah apabila tidak ada pelatihan mereka tidak tahu akan kemana mereka lari dan akan kemana mereka melindungi diri.

Demikian saya sampaikan terima kasih Bu Menteri dan Pak Doni.

Wa billahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Bu Ida Syahidah dari Golkar. Masih ada dari anggota? Tapi sebelum ke anggota saya mumpung ingat ini Pak Doni yang di halaman 13 ini Pak yang tunggakan Rp1,3 Triliun terhadap kebakaran lahan dan kebakaran hutan dan lahan ini ada usul revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran tidak perlu lagi melampirkan verifikasi BPKP. Ini mohon dijelaskan Pak kira-kira alasannya apa atau rumitnya dimana Pak karena kalau misalkan menurut kami masuk akal ya nanti kita akan sampaikan kesimpulan Pak.

Kenapa hambatan dimana Pak kenapa hambatannya Pak ada Pak Dirjen Anggaran hari ini dan sebagainya nanti Pak dijawab nanti Pak ini bagian dari pertanyaan saja biar nanti kita apa namanya dengarkan jawaban Pak Doni secara keseluruhan. Karena kalau ini menghambat ada lagi kebakaran hutan ya saya kita khawatir juga para vendor tidak mau memadamkan api yang disalahkan negara nanti tapi kita minta penjelasan saja Pak kalau misalkan nanti kita perlu kita dorong dari DPR ya nanti kan kita tawarkan kesimpulan rapat

Silakan siapa tadi Bu Lisda Hendrajoni dari Nasdem.

F- P. NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.M. Tr.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrohmanirohim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore.
Salam sejahtera untuk kita semua.

KETUA RAPAT :

Sebentar Bu Lisda saya lupa perpanjang waktu tadi, tadi 15.30 sampai jam 16 ya insyallah selesai. Tinggal Bu Lisda ke Pimpinan langsung jawab, sampai 16.00 ya, oke Bu Lisda lanjut.

F- P. NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.M. Tr.):

Terima kasih Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII.

Yang saya hormati Menteri Sosial Ibu Risma Kepala BNPB Pak Doni dan Dirjen Anggaran kementerian keuangan dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini.

Pertama-tama saya apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Doni beserta jajaran Bu Risma seluruh jajarannya yang sudah dalam waktu 1 tahun ini kita betul-betul selalu apa bergerak ya dalam wabah Covid-19 ini. Dan tadi yang saya dengar juga bahwa dalam 3 bulan terakhir ini *Alhamdulillah* kita bisa dapat menurunkan dibandingkan dengan dunia ini menurun angka positif menjadi 9, 72%.

Dan tentu namun tentu kita tetap harus artinya tidak lengah untuk terus mensosialisasikan ini karena kalau saya melihat bahwa dengan adanya vaksinasi ternyata ini juga padahal vaksinasi ini akan efektif kan setelah mungkin sebulan atau lebih dari pemberian vaksin yang dosis kedua ya tapi begitu kita sudah mendapat vaksin kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini sudah kebal seperti ini dan sosialisasi ini tentunya kita berharap terus dilaksanakan karena memang masih banyak saudara-saudara kita yang harus mencari nafkah yang harus keluar rumah ya sama juga seperti kita yang harus terus berada di lapangan.

Kemudian sebagai penyambung lidah rakyat ya saya di kesempatan ini hanya mengingatkan saja proposal yang sudah kita masukan dari Sumatera Barat khususnya Pak Doni. Karena ada beberapa wilayah yang memang rawan banjir abrasi dan itu menjadi apa ya setiap tahun memang itu yang terjadi juga longsor dan yang terakhir itu saya masukan dari Kecamatan Lengayang Pesisir Selatan, Tapan, Painan Kabupaten Solok dan juga Solok Selatan.

Kemudian untuk dana refocusing ini saya berharap bahwa tetap ada perhatiannya daripada BNPB dan juga Kemensos kepada tenaga-tenaga sukarelawan baik itu yang berada dari sosial Kementerian Sosial maupun juga dari BNPB. Sehingga mereka ini dapat menjadi perhatian karena bukan hanya pada saat penanggulangan bencana yang sedang terjadi sebenarnya mereka dapat kita manfaatkan dalam sepanjang tahun untuk terus mensosialisasikan dari banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat.

Dan terakhir untuk mungkin ini ke Bu Risma di wilayah kami ada terjadi kebakaran di beberapa lokasi dan saya sudah memasukkan proposal kemarin Bu mohon perhatian dari Bu Risma.

Demikian terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Teralhir dari meja anggota Pak Muhamad Ali Ridha dari Golkar Dapil Madura Raya.

F- P. GOLKAR (MUHAMMAD ALI RIDHA):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan segenap rekan-rekan Anggota Komisi VIII. Yang saya hormati Ibu Menteri Sosial Bu Risma Kepala BNPB dan perwakilan wakil dari Menteri Keuangan.

Singkat saja pertanyaan ke Bu Menteri terkait bantuan atau alokasi anggaran santunan korban meninggal Covid kepada ahli waris itu tahun 2020. Kalau tidak salah Bu Menteri ada surat dari PLT direktur ya waktu itu untuk membantu atau mengalokasikan anggarannya kepada keluarga korban meninggal Covid-19 teman-teman OPD di daerah itu sudah mendata dari korban meninggal itu dan kemudian berkirim surat kepada Kementerian Sosial untuk mendapatkan bantuan itu tahun 2020. Namun kalau tidak salah Februari kemarin ada surat dari direktur perlindungan sosial yang mengatakan tidak ada anggaran untuk korban keluarga korban Covid-19. Nah itu sekarang ini teman-teman ini merasa ditagih oleh masyarakat yang menjadi korban ini sehingga pada kesempatan hari ini, saya ingin menanyakan langsung kepada Ibu Menteri terkait tidak adanya anggaran yang dimaksud dalam Surat direktur perlindungan sosial.

Itu saja Pimpinan terima kasih Bu Menteri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Ali Ridha dari meja Pimpinan kami persilakan Pak Moekhlas Sidik.

WAKIL KETUA KOMISI VIII/ F- P. GERINDRA (LAKSDYA TNI (PURN)

MOEKHLAS SIDIK, M.P.A.):

Terima kasih waktu yang diberikan.

Yang saya muliakan yang saya hormati para undangan.

Rekan-rekan di Komisi VIII.

Para Undangan khususnya Ibu Menteri Bapak Ketua BNPB dan Pak Dirjen.

Saya bicara di tataran kebijakan di atas yang teknis teman-teman sudah sangat banyak, yang pertama kenapa persoalan ini selalu muncul selalu muncul karena yang pertama yang saya lihat pada tataran kewenangan sudah banyak overlap contoh Ibu Menteri di halaman 3 dan 4 Ibu menunjukkan kewenangan Ibu berdasarkan PP berdasarkan undang-undang, kalau dibahas di BNPB juga begitu makanya mestinya ada sinkronisasi kewenangan yang tadi biar tidak overlap.

Saya beri contoh kecil kalau ruangan ini ditangani pembersihannya oleh ada Kementerian Sosial, ada lembaga dan kementerian lain pasti banyak overlap. Akibat dari kewenangan yang overlap pasti anggaran juga overlap sedangkan di bawah anak buah kita di level bencana khususnya itu pada level yang mereka tidak tahu tataran itu dia tahunya perintah-perintah sementara di atas masih ada kewenangannya yang overlap maka tidak pernah selesai soalnya ini.

Yang kedua dana selalu kurang *panjenengan* pasti nanti bisa cerita panjang referensi sejauh kita hidup ini. Saya di ASN anak 37 tahun belum pernah anggaran ini terpenuhi dengan baik begitu memang konsep kenegaraan ini pasti antara kebutuhan dengan kesiapan anggaran pasti kurang. Maka ditunjuk para pemimpin-pemimpin yang cerdas ini supaya bisa mengatur yang namanya prioritas pasti kalau Bapak ngomong selalu anggaran pasti kurang, pasti dan pasti. Ayo kita ketemu berapa kali kalau saya tinggal 4 tahun lagi pasti ketemu yang soal ini.

Justru Bapak Ibu ditunjuk untuk bisa berpikir memecahkan bagaimana bikin prioritas sehingga anggaran itu walaupun kurang tapi bisa mencukupi tugas pokok Bapak kalau tidak ya sudah Bapak Ibu tidak akan disalahkan oleh negara kok yang penting dilaksanakan akhlakul kharimah. Permasalahannya ada menteri disini yang masuk penjara karena tidak akhlakul karimah dibawa nyopet-nyopet tidak akhlakul kharimah di level menengah kehilangan dana tidak akhlakul Karimah.

Bisakah kita mampu yang namanya mendidik anak-anak kita? Kalau tidak ini sebuah resiko, risiko sekali lagi karena punya anak punya buah yang tidak beres resikonya ya tercolong. Punya anak buah yang nyolong ya resikonya tercolong itu risiko. Maka secara internal mari kita bersama-sama membenahi sekarang jangan coba nuduh di bawah sana dilevel kita banyak yang nyolong. Sudah kita jujur, kita sudah lama jadi orang Indonesia tahu tentang itu mari kita perbaiki bersama.

Yang berikut saya ingin ngomong penggunaan anggaran yang efektif dan efisien ini sudah di doktrin sejak kami lahir di ASN sudah di doktrin tapi pelaksanaannya belum mampu atau belum tentu mampu padahal di level kita tahu itu apa lagi di bawah sana yang tinggal pelaksanaan ini menjadi permasalahan kita.

Yang berikut tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bencana itu tak terduga dari 4 sisi yang saya lihat kapannya, jenisnya, caranya dan dampaknya menurut saya itu tidak bisa terima begitu saja. Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi sangat memberikan janji yang paling tinggi persoalan dunia pasti diberi tahu oleh Allah dengan namanya permulaan-permulaan saya beri contoh orang sebelum mati barangkali sakit dulu kalau tabrakan pasti nabraknya tidak nabrak dulu. Ini juga begitu kalo ada banjir pasti didahului dengan hujan, hujan didahului dengan mendung tidak mungkin sebuah mangga tau-tau besar tanpa ada kembang atau bunga dulu ini *sunnatullah*. Kita mampu tidak membaca itu? coba anak bayi yang kita gendong kita ajak melihat mangga yang sedang bunga. "Nak ini sebentar lagi mau buah" Tidak percaya dia paham itu belum tahu ilmunya itu kalau kita pasti tahu oh dua bulan lagi punya pete yang sudah buah kecil 4 bulan lagi panen, pasti ada tanda itu.

Nah anak buah Bapak mampu tidak membaca tanda alam ini? kekeringan, kebakaran didahului dengan kekeringan, kekeringan didahului dengan tidaknya hujan, kebanjiran didahului dengan hujan deras dan hujan didahului dengan mendung kalau ini tidak mampu kita baca Wa Sallam kita begini gini terus *ngene-ngene wae*.

20 tahun ke depan kita masih bicara gini-gini saja karena tidak mampu makanya ilmu perang Pak Doni pasti paham kita sama-sama tentara pasti ada namanya intelegen yang mengkalkulasi bagaimana kekuatan musuh bagaimana pergerakan musuh bagaimana kesenjangan musuh. Nah kita juga begitu dong kalau kita tidak istighfar terus tok, astaghfirullah tapi bencana jalan. Sudah istighfar ini. Oleh karenanya perlu kombinasikan ini Bapak Ibu diberi kewenangan bangsa ini untuk menata sesuai kewenangan Ibu. Oleh karenanya yang tadi saya tidak bisa terima namanya bencana itu tidak saya tidak bisa menerima ada awalannya ada introduksinya. Contohnya kita, kita umur 50 tahun mulai rambut kita dikasih putih sudah mendekati mati ini harus hati-hati ini, sebentar lagi di gigi kita rontok, ah ini mendekati lagi. Tidak ujuk-ujuk mati tidak begitu sama dengan alam kita ini

Kemudian yang terakhir tolong antara kewenangan di tangan Bapak Ibu dengan pelaksanaan di bawah. Khususnya yang di bawah Pak jangan diberi kesempatan membuat kebijakan, kebijakan ada di tangan Ibu Menteri, BNPB dan sebagainya tapi begitu dibawah langsung pelaksanaan tidak ada

excuse salah gantung saja gantung saja gantung saja tidak usah ragu-ragu. Misalnya hari ini ketahuan ini nyolong sudah copot saja jangan di tunggu lama-lama dia tidak boleh dalam konteks pelaksana di bawah dia mengambil kebijakan, kebijakan ada di Ibu Bapak sekalian. Maka tatkala itu aturan Bapak breakdown kebawah, harus betul-betul bisa dilaksanakan atau di level anak buah kita yang bisa betul-betul terlaksana perintah Ibu Bapak sekalian.

Mohon maaf agak keras terima kasih. Semoga ini menjadi jamu dan itu menyehatkan walaupun pahit. Silakan saya dibenci semoga ini bagian dari jamu saya terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Bagaimana mudanya ini Bu Risma? Tuanya begini nih Pak Muklas ini masih kencang saja. Ya baik terima kasih Pak Muklas Sidik dari Gerindra. Kami persilakan pada Ibu Diah Pitaloka Wakil Ketua dari PDI P.

WAKIL KETUA KOMISI VIII/F- PDI PERJUANGAN (DIAH PITALOKA, S. Sos. M.Si.)

Terima kasih Pak .

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati para undangan dalam rapat ini.

Ibu Risma Menteri Sosial Republik Indonesia.

Pak Doni Monardo Kepala BNPB;

Dan juga hadir Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI.

Saya ingin sebetulnya pembahasan kita ini tentang skema anggaran Pak, skema anggaran kebencanaan. Dari yang di dipaparkan Bu Risma dan Pak Doni memang jadi tergambar di Bu Risma bicara tentang ada klaster pengungsian dan perlindungan hidup itu urusannya manusia ya kemanusiaan. Itu mungkin salah satu titik sentral juga dalam penanganan kebencanaan. Juga ada manajemen logistik bantuan karena ini untuk membantu ancaman hidup dari korban bencana harus berpikir tentang manajemen logistik yang tadi ada presentasi gudang dan lain-lain.

Lalu dari Pak Doni menariknya adalah ketika kita buka anggaran Bapak kantongnya banyak Pak. Ini yang lucu anggaran rutinnya 2015 *nih* anggaran rutin Rp1.661 Triliun; DSP-nya 1.9 ya kan? Jadi lebih tinggi DSP sedikit. Di tahun 2020 anggaran rutinnya Rp430 Miliar DSP Rp12.000.000.000,- Nah ini kan berarti tidak ada parameter dalam bicara *range* anggaran antara anggaran rutin dengan dana siap pakai? Tadi Pak Dirjen keuangan menarik bilang bahwa anggaran bencana ini kan kalau ada

bencana kalau tidak ada bencana bisa kelebihan kalau ada bencana bisa kekurangan.

Nah kenyataannya hari ini kita berhubungan selalu dengan bencana. Misalnya kebakaran hutan, kebakaran hutan nanti mungkin kita perlu pertemuan khusus Pak. Karena kebakaran hutan itu tiap tahun, nah kenapa tahun ini kita sampai berhutang Rp1.3Triliun. Bagaimana mekanismenya siapa yang mengusulkan? Bagaimana membayarnya? Nah inikan bicara tadi sekali lagi tentang mekanisme anggaran.

Nah di Pak Doni tadi ada anggaran DSP ada anggaran rutin lalu ada anggaran ada program ini mungkin nanti saya minta dijelaskan juga yang IRDP apa ya IDRIP itu ya itu dolar ya sekian mungkin 100 dolar lebih Rp100.000.000,- dolar lebih ya 50 dan 60 juta dolar kalau tidak salah. Lalu juga ada bantuan Covid .

Nah persoalan berikutnya adalah yang tidak mudah pengawasannya bagaimana dengan banyaknya pos anggaran yang tidak selalu masuk kedalam pembahasan APBN ini kita membangun sistem pengawasan. Nah ini yang kita juga sebagai DPR Kadang sulit kita tahu bencana ketika ada bencananya rame tapi setelah ada bencananya sudah tidak kedengeran lagi begitu, sehingga kita tidak tahu juga bagaimana mengejar pertanggung jawaban anggaran kebencanaan.

Nah ini yang skema anggaran ini menurut saya Pak Dirjen harus dibahas juga skema pengawasannya karena kayak DSP itu kan berbagai kementerian. Kita bahkan di Komisi VIII tidak paham juga anggaran Covid ini mekanismenya makanya kalau tadi Pak Doni ketukar dengan Komisi IX ya mungkin karena juga suka rapat di kesehatan kan begitu? Nah ini tidak semua kita bisa baca. Nah sekali lagi bicara kembali ke Pak Dirjen skema anggaran kebencanaan kita Komisi VIII kita melihat penting dan memang kalau basic bencana yang ada selama ini memang banyak kekurangan. Itu yang kenyataannya tiap tahun kekurangan.

Nah kalau sifatnya anggaran kebencanaan ini *emergency* itu pengawasannya repot Pak kayak DSP juga kita tidak tahu begitu harus tanya ke siapa. Kita tidak pernah juga dapat laporannya, laporannya total DSP total sekian-sekian Triliun tapi bagaimana penggunaannya bagaimana pengajuannya bagaimana pertanggungjawabannya, kita tidak tahu.

Nah ini menurut saya yang harus dibenahi dalam skema penganggaran kebencanaan. Bagaimana sih sebetulnya format -ini rencana ya ini bicaranya renstra rencana strategis anggaran kebencanaan ini menurut saya harus disusun lagi- bagaimana sebetulnya kita memposting dana kebencananya hari ini di Indonesia tiap tahun ada kebencanaan? Itu sudah kaya anggaran rutin sebetulnya bencana itu di kita.

Setiap Desember itu pasti banjir di Jawa Barat tadi titik merahnya di Jawa Barat ternyata banyak uangnya ke hutan iya kan? Nah ini ini ukuran-ukuran ini parameter-parameter distribusi anggaran kebencanaan ini yang kita minta harus ada. Karena apapun Ini anggarannya harus ada pertanggungjawabannya gitu, tidak bisa sementara pengawasan di tengah

bencana kita tahu betapa sulitnya melakukan pengawasan di tengah kebencanaan.

Jadi kembali lagi ya kita sekali lagi dalam rapat ini ingin bagaimana sebetulnya kita membaca skema anggaran kebencanaan baik operasional ataupun emergency ataupun manajemen kebencanaan. Karena kita mikirnya bencana itu kalau ada kejadian baru gudugan begitu menyalurkan bantuan tapi kita tidak pernah terpikir membangun manajemen sistem kebencanaan sebelum terjadi bencana. Kayak Bu Risma ini mungkin di lapangan terpikir gudang, kita tidak punya gudang yang bisa mendistribusi. Portal bantuan itu susah akhirnya dibangun sistem pergudangan. Tapi jarang orang yang berpikir adanya manajemen kebencanaan. Nah makanya salah satu di Komisi VIII yang diusulkan dalam bencana itu anggaran kebencanaan karena bencana ini sifatnya bukan hanya Bansos. Bukan hanya bantuan sosial tapi persiapan skill; persiapan *equipment*; persiapan manajemen logistik. Nah ini yang saya minta di kementerian keuangan untuk memikirkan kembali pendekatan terhadap kebencanaan karena sifatnya udah bukan lagi ada bencana atau tidak bencana bencana itu tiap tahun sudah menjadi rutin kita tidak berharap ya.

Tapi hari ini dari kalkulasi geologi kita gitu geospasial kita itu menjadi bagian dari kehidupan kita jadi anggarannya tidak bisa *emergency call*. Anggarannya harus sistematis sehingga kita pengawasannya juga gampang kalau tidak enak sekali itu begitu kalau pendekatannya *emergency* pengawasan dan pertanggungjawabannya kita susah kejar.

Mungkin demikian dari saya Pak Ketua. Terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Terima kasih Ibu Diah Pitaloka. Baik Bu Menteri Pak Kepala BNPB Pak Dirjen Anggaran banyak saran masukan tadi. Silakan Ibu Menteri memberikan respon. Tentu tidak satu persatu Bu karena saya yakin Ibu sudah bisa menyimpulkan apa maksud dari para snggota termasuk Kepala BNPB dan Dirjen Anggaran. Untuk pertama kami beri kesempatan kepada Menteri Sosial silakan Bu.

MENTERI SOSIAL :

Terima kasih. Jadi yang pertama bahwa kami untuk di DTKS karena ada pertanyaan ini kami saat ini sedang menurunkan tim untuk membantu daerah untuk memasukkan data. Ada 77 daerah yang belum melakukan perbaikan masih di bawah 20%. Saat ini kami kerja sama dengan perguruan tinggi kami akan turun di 77 daerah.

Kemudian yang berikutnya adalah kelompok rentan. Jadi sekarang ini kami bahkan kami mendesain tenda kami adalah sangat-sangat aman untuk kelompok rentan terutama kaum perempuan. Jadi tenda kami ada sekat-sekat yang kita desain bahkan mungkin nanti yang tahun ini juga akan lebih bagus lagi karena tidak bisa bercampur karena pintunya ada dari luar begitu. Jadi mendesain seperti itu kemudian juga lebih dingin apa namanya tenda yang sekarang yang saat ini.

Kemudian untuk manajemen percepatan bantuan memang kalau saya cek sebelum kita kirim bantuan selalu saya cek buffer stok. Bagaimana yang terjadi? Adalah 1 hari sudah habis daerah. Jadi karena itu kita harus mengirim di hari kedua hampir rata-rata setelah kita cek bagaimana hari pertama sudah habis Bu, hari pertama. Jadi hari pertamapun sudah habis. Jadi kami harus mengirim untuk segera mungkin kalau tidak mau ada keterlambatan itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga adalah jadi bahwa memang semua kalau itu harus tadi konsep misalkan penyebaran percepatan untuk, kenapa kemudian saya sebar di Balai diklat kami karena mereka bisa langsung turun tadi salah. Jadi Badiklit kami ada 6 kemudian 41 sekarang kita sudah punya buffer stock di 47 tempat karena kemarin juga buffer stok makanya nanti kami akan konsultasi untuk dana Dekon yang Rp27.000.000.000,- mungkin hanya tertentu provinsi karena beberapa kali saya lebih datang dulu dibandingkan buffer stok yang ada di provinsi. Jadi karena itu apa namanya terus terang kami tidak bisa kemudian *rely on* hanya tadi betul disampaikan daerah ataupun itu tidak bisa.

Kemudian yang berikutnya adalah jadi untuk tadi anggaran korda. Memang kemarin saya minta dasarnya itu apa kenapa semua sama sekarang lagi diperbaiki, diperbaiki janjinya minggu ini Pak karena supaya memang saya melihat tidak bisa seperti ini sistemnya tidak bisa seperti ini dan itu juga ada misalkan masalah PKH juga tidak bisa seperti itu sistemnya jadi kemudian sama rata sama begitu. Memang tidak, karena itu kenapa semua saya evaluasi Pak jadi semua bukan di saya Pak semua juga pengeluaran keuangan juga ada di Dirjen tapi bahwa saya memang harus mengevaluasi program-program yang memang harus ini bagaimana seperti itu. Contohnya tadi kenapa keluar Rp3.000.000.- saya tanyakan ini boleh dicek tadi pagi saya tagih mana itu kok belum jadi ya Bu. Mudah-mudahan minggu ini kelar, karena memang itu harus di evaluasi terhadap tadi situasional kondisi daerahnya situasional kondisi itu memang harus ada perbedaan bahkan kami pun Pak kenapa tadi saya sampaikan kenapa evaluasi di Balai. Di balaipun itu karena letaknya kemarin kita ke Manggarai itu 8 jam jaraknya. Kita jalan darat yang kondisinya sangat rusak berat bahkan saya ngomong tolong komunikasi dengan apa off road untuk otomotif untuk kita bisa mencapai disana saya sampaikan begitu.

Kemudian yang berikutnya adalah kami juga sudah menyampaikan mungkin ini ada dari Kementerian Keuangan mungkin bisa diberikan kalau saya melihat banjir di sepanjang Pantura Itu penyebabnya adalah sungai-sungai yang sudah sangat dangkal. Mungkin ada diberikan bantuan alat untuk daerah saya sudah mengusulkan ke Bu Menteri saat itu, untuk mereka diberikan alat untuk mereka bisa mengeruk sendiri, kalau sungai itu hampir

sebagian besar itu karena pendangkalan sungai. Tidak mungkin semuanya dilakukan oleh Kementerian PU.

Kemudian yang berikutnya adalah untuk bantuan-bantuan kita sudah proses Ibu kemudian berikutnya bantuan Covid. Jadi begini Pak, jadi pada saat saya tanyakan itu saya 23 Desember menjadi Menteri saya tanyakan Bu ini kemarin itu apa namanya ada anggaran sedikit terus kemudian diberikan makanya yang datang tanda tangan PLT Pak. Sebetulnya dari sisi aturan dia tidak berhak tapi PLT-nya saat ini sudah masuk Pak.

Nah ternyata uangnya tidak cukup Pak. Kalau kita hitung Rp1.000.000,- itu kali Rp15.000.000,- berarti uang Rp15.000.000.000,- Pak dibutuhkan sedangkan anggaran kami tidak ada sebesar itu. Bahkan untuk tali asih saja kurang lebih jumlahnya kurang lebih jumlahnya hanya Rp10.000.000.000,- santunan itu jadi tidak mungkin kami bisa penuhi kenapa kemudian saya sampaikan saya tidak mau apa namanya menyangkut itu karena sebetulnya dari sisi aturan pun salah membuat surat edaran itu PLT, Direktur tidak dia mengeluarkan surat itu seperti itu Pak.

Jadi karena itu ini saya sudah komunikasi dengan dengan Menpan Kementerian Pan juga bagaimana proses administrasi ini yang pertama bahwa disampaikan bahwa itu tidak betul yang kedua uangnya juga tidak ada kami senang juga Pak membantu cuma masalahnya uangnya anggarannya tidak ada kalau dihitung Rp1.000.000.- Surabaya saja butuh saya hitung Rp750.000.000.000,- duit darimana anggaran bencana kami Rp212.000.000.000,- total itu bencana termasuk bahan makanan jadi yang baru di kami Pak yang baru kami kami kenapa tadi mengambil beberapa anggaran itu karena kami pengen punya juga saat kami turun Pak itu dimintain bantuanku mana perahu kami tidak punya Bu. Mana lampunya mati di Mamuju itu sampai saya harus pakai mobil Pak mobil itu kita nyalalakan karena kita tidak bisa masak kita tidak bisa buat dapur umum karena tidak ada genset. Makanya sekarang kita beli genset untuk yang tidak ada bahan bakarnya kita punya sekarang Pak sekitar alokasi kami itu.

Jadi seperti itu yang kita temukan di lapangan. Kemudian kita apa namanya kita siapkan untuk itu termasuk tadi kemarin pada waktu di Subang Bu ini tidak bisa pakai perahu ini saya minta telepon SAR. Tolong saya datangkan tidak bisa kena arus. Saya sampaikan begitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang kemudian kenapa kami ada beberapa penambahan yang kita siapkan untuk itu jadi seperti genset seperti apa namanya perahu karet, terus tenda kecil. Jadi pada waktu kejadian di Mamuju Pak kita cari tanah lapang tidak bisa kenapa kemudian kita pilih stadion tanahnya kecil-kecil tendanya gede tidak cukup. Kalau tendanya gede tidak bisa akhirnya kemudian kita harus buat desain tenda yang kecil supaya dengan lahan yang kecil-kecil kita bisa pasang seperti itu.

F- P. GOLKAR (MUHAMMAD ALI RIDHA):

Mohon maaf Pimpinan. Maksud saya begini Bu Menteri yang saya tanyakan itu adalah bantuan terhadap korban Covid yang meninggal?

Angkanya. Tidak mengerti yang meninggal itu kan tidak mohon maaf tadi Bu Menteri.

MENTERI SOSIAL :

Gede jumlahnya jumlahnya, yang meninggal besar.

KETUA RAPAT :

Yang meninggal banyak Pak Ali. Memang yang meninggal itu tidak lapor tapi kita catat.

MENTERI SOSIAL :

Yang meninggal banyak Pak Doni bisa menyampaikan yang meninggal sampai.

KEPALA BNPB :

Sampai dengan hari kemarin Pak sekitar 38.000 jiwa yang telah meninggal dunia Pak.

F- P. GOLKAR (MUHAMMAD ALI RIDHA):

Tapi maksud saya mohon maaf Bu Menteri, tadi Bu Menteri itukan mengalihkan antara Rp1.000.000.000,- menjadi sekian puluh triliun itu ketika yang meninggal itu ada jumlahnya sangat signifikan kalau tadi Pak Kepala BNPB menyampaikan yang meninggal 32.000 kalau dikalikan 1.000.000.000 karena ini yang saya tanyakan bukan korban Covid tapi korban meninggal dunia. Jadi meninggal dunia sepanjang apalagi tadi dipertegas oleh Kepala BNPB 32.000 artinya bukan angka yang terlalu besar untuk memberikan bantuan.

MENTERI SOSIAL :

Tapi sulitnya, saya hitung ya Pak Rp350.000.000.000,- Pak, masa habis semua kesana masa anggaran tadi saya sampaikan Rp750.000.000.000,- masa anggaran kita saja Pak untuk bencana saya total itu tidak cukup.

F- P. GOLKAR (MUHAMMAD ALI RIDHA):

Artinya memang pada saat itu belum menjadi Menteri tetapi itu seingat saya itu menjadi kebijakan daripada Kementerian Sosial saat ini kemudian

ketika itu sudah menjadi kebijakan Dinas Sosial, itu sudah mendarang. Kirakira begitu maksud saya tadi saya mau mengatakan jangan-jangan tadi termasuk Bu Risma saat itu ketika menjadi wali kota.

MENTERI SOSIAL :

Iya betul cuma kemudian di akhir itu karena uangnya tidak cukup tidak diberikan. Saya masuk sudah tidak ada uangnya, habis sekarang total kita tidak bisa untuk yang bencana betulan begitu karena tidak ada anggarannya total itu 232 realisasi 19 sekarang tinggal 212. Nah masalahnya Covid ini sampai kapan begitu Pak itu masalahnya juga.

Matur nuwun Pak.

KETUA RAPAT :

Baik terima kasih Ibu Risma. Sebenarnya kita tetap menginginkan nanti Kementerian Sosial karena sebagai leading sector revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 skema anggaran itu penting Bu skema anggaran biar tidak kita tidak terkaget-kaget Bu atau hanya tiba kita juga tidak mau Republik ini diatur begitu itu. Sehingga undang-undang insyaallah nanti mengatur sedemikian rupa dan skema dan anggarannya kami persilakan.

MENTERI SOSIAL :

Mohon maaf boleh usul Pak walaupun nanti itu harus tetap lewat DPR Pak kami mengeluarkannya kalau nanti misalkan itu belum teranggarkan itu kalau kami menggunakan dana itu harus kami lewat DPR menurut usulan saya Pak jadi tidak bisa kemudian kami langsung menggunakan begitu misalkan nanti persetujuannya seperti itu

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Kepala BNPB Pak Jenderal Doni Monardo.

KEPALA BNPB :

Terima kasih Bapak Pimpinan kami mungkin jawab untuk seluruhnya poin per poin yang pertama menyangkut masalah karhutla. Jadi kami memberikan ilustrasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 dimana saat itu luas lahan yang terbakar itu mencapai 2.6Juta Hektar.

Presiden sampai beberapa kali turun ke lapangan Pak mengarahkan seluruh unsur TNI dan Polri bahkan beliau sempat ke lapangan lantas kembali kemudian beliau balik lagi ke tempat yang sama untuk melihat apa yang terjadi namun unsur lapangan sudah tidak lagi di tempat karena apa karena menghadapi asap ini Pak penderitaan adanya Pak tidak tahan kita Pak

dengan segala perlengkapan yang dimiliki pun tidak punya kemampuan bertahan di tengah asap dan kita membiarkan prajurit kita membiarkan tenaga termasuk masyarakat peduli api relawan itu menjadi korban dan saya mencatat puluhan ribu petugas yang setelah bekerja memadamkan api itu mengalami penderitaan terutama paru dan kerugian ekonomi karena kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 mencapai Rp161 Miliar US 200 dollar setara dengan Rp220.000.000.000,-.

Kemudian apakah kita menyerah disitu? Tidak Pak kita berupaya untuk melakukan berbagai langkah upaya tahun 2016 terjadi penurunan walaupun memang diakibatkan karena adanya kekeringan basah. Kemudian 2019 kembali lagi kebakaran itu meluas sama seperti tahun 2015. Tetapi karena kita sudah punya pengalaman yang lebih baik, maka upaya kita relatif agak lumayan berhasil, sehingga *trans secondary haze* yang apa namanya terjadi tidak ada lagi Pak.

Kita sempat di hujat oleh sejumlah negara karena dianggap pemerintah gagal dalam mengendalikan Karhutla tahun 2019 saja walaupun kebakaran titik apinya sama antara tahun 2015 dengan 2019 tetapi luas lahan yang terbakar berbeda 2015 2.6 Juta Hektar, 2019 adalah 1.5 Juta sekian hektar. Nah kemudian masalah helikopter *water bombing* kenapa mahal kita tidak punya pesawatnya Pak semua pesawatnya sewa dari luar negeri dari Rusia dari Amerika dari Australia dan beberapa negara Eropa lainnya. Dan mendatangkan pesawat ini ke tanah air Pak itu butuh biaya, biaya itu ditanggung pemerintah dan sekali transportasi pengiriman pesawat helikopter ini harganya pun miliaran rupiah.

Setelah mereka selesai melakukan tugasnya mereka tidak boleh berada di tanah air Pak mereka harus kembali ke negara asalnya. Itu kita membiayai Pak saya sudah melapor kepada Menkopolkam tentang aturan ini saya mohon kepada Menkopolkam untuk melakukan rapat terbatas dengan sejumlah kementerian agar kemudian kita harus punya kemudahan-kemudahan untuk memiliki helikopter yang stand by sepanjang tahun dan sudah disetujui oleh Bapak Menkopolkam dan kami juga sudah memberitahukan kepada Menteri Perhubungan yang mana nanti akan disiapkan bandara Kertajati untuk adanya hangar, selama kita tidak punya aturan yang memberikan kemudahan kepada pesawat helikopter untuk tidak kembali ke negaranya maka biaya yang dikeluarkan pemerintah akan sangat besar sekali.

Kemudian dari usulan saya ini kemungkinan nanti adalah Helikopter itu bisa bertahan di tanah air lantas mereka bisa menyewa bandara yang ada dimana nanti hanggar ini akan disiapkan oleh Angkasa Pura 2 selaku penanggung jawab bandara Kertajati. Artinya selama mereka parkir pesawat di tanah air maka mereka juga bisa membayar jasa hanggar kepada pemerintah lewat angkasa pura 2.

Nah skema inilah yang sekarang kami pikirkan supaya anggaran untuk sewa helikopter ini bisa kita tekan. Makanya kenapa besar sekali biaya pemadaman api ini karena tidak ada pilihan lain Pak. Mengerahkan pasukan jangankan ribuan Pak puluhan ribu saja tidak mau Pak apalagi yang jaraknya sudah jauh di tengah hutan dan itu terjadi sepanjang tahun Pak karena kalau

perkebunan nyaris tidak ada yang terbakar Pak, yang terbakar itu adalah perlahan-lahan yang sudah apa namanya

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Line cleaning Pak yang baru dibuka mau jadikan kebun itu dibakar karena biaya perawatannya murah.

KEPALA BNPB :

Nah itu yang terjadi Pak kemudian kalau bisa Bapak bayangkan kalau kita misalkan mengarahkan prajurit TNI PORI apakah kita tega membiarkan nafas mereka paru-paru mereka rusak seumur hidup Pak? Jadi tidak ada pilihan lain adalah dengan menggunakan Helikopter water bombing dan inilah langkah kita yang paling mudah dan relatif murah dengan tidak mengorbankan tenaga manusia warga negara, masyarakat kita terutama para petugas dari TNI POLRI dari BPBD dari badan SAR dari pemadam kebakaran sebagainya.

Kemudian juga pengaman kami Pak, karhutla ini luar biasa Pak terutama lahan gambut setelah terbakar ternyata itu tidak bisa padam dengan sendirinya Pak walaupun sudah di guyur dengan air water bombing kalau kurang sedikit saja itu kering lantas kebakaran dan asapnya luar biasa dan itu yang terjadi sepanjang tahun. Jadi apa yang disampaikan Pak Moehklas tadi menurut saya sangat benar kekeringan dan banjir serta banjir Bandang adalah sebuah peristiwa yang bisa diprediksi. Oleh karenanya dua kejadian alam ini harus ada upaya mitigasi dan penjagaan dan ini yang diperintahkan Bapak Presiden.

Berulang kali saya ulangi lagi Pak berulang kali jangan sampai kita pontang-panting karena kita tidak siap nama lewat forum inilah. Saya mungkin bisa memberikan masukan dua bentuk kejadian bencana ini harus kita prediksi dan kita perkuat mitigasinya kita perkuat kesiapsiagaannya kita tingkatkan pencegahannya saya sudah berkeliling ke berbagai Provinsi Pak banyak hutan-hutan yang ditebang hanya untuk masyarakat membuka lahan pertanian terutama jagung dan saya ingatkan kepada daerahnya kalau Bapak masih membiarkan program seperti ini membagikan jagung dan pupuk kepada petani pantas mereka menebang pohon nanti tinggal dulu waktu banjir-banjir bandang dan tanah longsor dan itu yang terjadi hari ini pak.

Jadi apa yang sudah kami sampaikan, berulang kali pada daerah karena tidak ada program anggaran kontingensi di BNPB. Maka kami tidak bisa berbuat kami baru boleh bekerja setelah ada kejadian setelah pemerintah daerah menentukan status darurat sebelum ada itu tidak bisa Pak Mungkin lewat forum ini ada Pak ada Pak Dirjen Anggaran bisa merumuskan sebuah skema upaya pencegahan upaya mitigasi termasuk juga program literasi yang harus ada dalam seluruh pendidikan dasar kita tentang kebencanaan, bagaimana anak-anak diajarkan dari sekarang. ni belajar tentang ekosistem belajar tentang lingkungan.

Pulau Jawa ini Pak mau tanya sudah sangat minim sekali dan sebagian besar sungai-sungainya sudah mengalami perubahan karena sungai dijadikan tempat pembuangan limbah. Sampai kapan? Ini kita pertahankan kita hidup hari ini harus mewarisi masa depan lingkungan hidup yang lebih baik kepada generasi yang akan datang. Kalau tidak bisa bagaimana kita bisa bersaing kepada bangsa-bangsa lain di dunia pada tahun 2045 yang akan datang menuju Indonesia emas kalau air saja sudah sulit karena kekeringan ketika banjir datang kita kewalahan untuk menyiapkan tempat-tempat pengungsian.

Sehingga keinginan dari Bapak Pimpinan tadi dan juga para Wakil Ketua untuk menetapkan 2% anggaran untuk APBD menurut kami adalah suatu langkah yang sangat strategis. Supaya apa? Ada kewajiban daerah untuk melakukan berbagai langkah upaya pra bencana, darurat bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi disinipun. Kami berharap ada batas kewenangan sehingga daerah tidak selalu mengajukan kepada pusat kepada BNPB. Jadi kami baru boleh memberikan bantuan yang seperti Bapak inginkan tadi manakala ada batasan bahwa kalau bencananya tidak terlalu besar.

Kemudian korban jiwanya sedikit lantas juga yang mengungsi tidak banyak Pemerintah pusat tidak boleh turun tangan. Katakanlah begitu supaya daerah bisa mandiri kalau tidak ketika diusulkan mereka sudah tentukan status kemudian mereka mengusulkan DSP kepada kami, kami tidak berikan kami nanti disalahkan Pak disangka pemerintah pusat tidak memperhatikan daerah apalagi daerah-daerah tertentu yang secara ekonominya kecil anggarannya kecil. Lantas ketika mereka mengajukan kami tidak bantu nanti jadi pesan baru buat kami semua jadi ini dilematis buat kami.

Namun manakala nanti serta penetapan 2% anggaran APBD untuk kebencanaan maka kamipun punya sebuah keyakinan kapan daerah harus dibantu dan selain itu tentunya kita berharap daerah bisa mandiri untuk mengelola resiko bencana mulai dari kajian resiko bencana menyusun rencana kontijensi dan juga melakukan latihan-latihan simulasi itu harus rutin dilakukan tidak cukup hanya sekali dan tidak bisa hanya melibatkan TNI Polri semata dan aparat BPBD tetapi harus melibatkan masyarakat.

Kemudian berikutnya untuk DTH untuk Mamuju sudah disalurkan selama periode untuk 3 bulan Pak sebesar per keluarga Rp500.000,- kenapa DTH ini penting Pak kami berharap masyarakat ini tidak lama di pengungsian dan mereka bisa menyewa rumah keluarga saudaranya sehingga bisa mengurangi resiko terpapar Covid Kalimantan Selatan. Kemudian Sulawesi Barat jumlahnya itu ribuan orang yang mengungsi. Jadi kalau tidak kita carikan solusi untuk segera menyewa rumah maka di pengungsian itu jelas sangat tidak layak dan sangat tidak nyaman Pak dan kami menghindari membangun hunian sementara karena kalau membangunnya sementara berarti kami harus menyiapkan lagi paket untuk hunian sementara. Dan biaya untuk membangun hunian sementara itu paling murah itu tidak ada yang Rp10.000.000,- Pak pasti diatas itu lebih baik kami menyalurkan dana tunggu hunian dari pada harus menyiapkan hunian sementara.

Kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana kami sekarang berusaha untuk mendapatkan data yang valid dari daerah untuk segera diusulkan kepada Kementerian Keuangan agar dananya bisa cair untuk segera dilakukan pembangunan supaya masyarakat secepat mungkin bisa menempati rumah mereka karena Covid masih berlangsung. Inilah upaya-upaya kerja keras dari pemerintah pusat BNPB bersama dengan daerah dan biasanya selalu saja ya ada data ganda data yang apa namanya KTP-nya sama kemudian namanya juga. Ini yang tugas kami untuk supaya tidak terjadi temuan pada waktu kemudian hari.

Kemudian kami juga berharap dana stimulan untuk pembangunan rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan terutama rusak sedang dan rusak ringan ini juga mungkin bisa didapatkan dukungan dipercepat oleh Kementerian Keuangan supaya bisa dilakukan dengan swakelola sehingga masyarakat tidak perlu terlalu lama berada di tempat pengungsian. Sedangkan untuk rumah rusak berat diharapkan nanti adalah bantuan dari TNI dan Polri yang sudah disepakati sehingga rumah rusak berat bisa dipercepat pembangunannya.

Kemudian selanjutnya kami laporkan tentang masalah adanya laporan dari sejumlah LSM tentang reagen merek tertentu yaitu Sansure yang dikembalikan oleh rumah sakit. Itu betul bahwa temuan BPKP pada bulan Agustus yang lalu yang mengatakan ada 400.000 sekian unit RNA abstraksi merk sansure. Jadi komponen reagen PCR ini ada 3 RNA abstraksi kemudian reagen PCR-nya dan satu lagi adalah VTM-Kit yang tidak bisa optimal digunakan itu adalah RNA-nya. Namun Bapak Ibu sekalian pemilihan jenis ini ditentukan bukan oleh satu dua orang ini oleh tim melibatkan ahli di bidang patologi klinis dan juga micro biologis.

Kebetulan kami disini Satgas ini tidak punya Dokter-dokter yang ahli Jadi kami mengundang dari IDI dan dari sejumlah pakar perguruan tinggi yang memutuskan pilihannya adalah merek tersebut karena pada awal Covid terjadi yang namanya reagen itu rebutan Pak seluruh dunia bahkan ketika tanggal 13 April 2020 reagen itu habis Pak stok tidak ada sama sekali kepala Balitbangkes Kementerian Kesehatan itu menjelaskan kepada saya stock tidak ada habis.

Kalau waktu itu dibiarkan tidak ada reagen, apa yang terjadi tidak ada pemeriksaan kepada warga masyarakat yang sudah diduga kontak erat dan terpapar Covid. Berarti mereka akan banyak sekali OTG orang tanpa gejala yang berpergian dan tidak diketahui ibaratnya kalau kita ingin apa analoginya kalau seandainya orang yang sudah sakit itu ibarat Harimau yang berada di kebun binatang tapi kalau OTG ini adalah harimau yang lepas di perkotaan yang siap memangsa siapa saja. Bayangkan kalau seandainya ini dibiarkan terus mereka menulari kelompok rentan maka konsekuensinya adalah kematian bagi kelompok rentan usia lanjut dan komorbid. Jadi pemilihan merk ini adalah atas dasar kajian para pakar.

Kemudian temuan BPKP itu sudah ditindaklanjuti oleh BNPB. Jadi ini adalah temuan internal BPKP yang ada di BNPB dan segera kami tindak lanjuti. Nah adapun seandainya masih ada RNA abstraksi yang belum bisa

digunakan boleh dikembalikan untuk dimanfaatkan ke lab lain yang bisa menggunakan karena tidak semua lab.

Jadi Bapak Ibu semuanya 12 Kementerian lembaga yang memiliki kewenangan mengelola laboratorium. Ada Kementerian Kesehatan ada daerah punya lab daerah ada BPOM ada BUMN, ada rumah sakit swasta, TNI-Polri. Jadi 12 termasuk Kementerian Agama punya laboratorium Kementerian Pertanian punya laboratorium dan setiap laboratorium itu merek alatnya berbeda-beda. Jadi ketika reagen datang dibagikan ke daerah belum tahu secara teknis jenis alat yang ada di daerah itu apa. Jadi kemudian setelah dapat laporan tidak bisa digunakan dilatihlah oleh tim gabungan antara pakar dari BNPB Satgas yang isinya bukanlah orang BNPB asli tetapi mereka-mereka yang kami rekrut yang secara apa pilihan-pilihan ada perwakilan dari Kementerian Kesehatan, dari perguruan tinggi yang duduk di BNPB itulah yang melatih seluruh daerah yang memiliki laboratorium ada yang akhirnya bisa ada yang tidak bisa yang tidak bisa minta dikembalikan dan sekarang masih dalam proses.

Seandainya masih ada lagi yang tidak bisa digunakan kami tidak ingin terjadi kerugian negara. Oleh karenanya saya meminta kepada daerah yang masih memiliki reagen yang tidak bisa digunakan segera kembalikan kalau toh memang sudah *expired* maka apa namanya penyedia barang itu wajib untuk menggantinya dan itu ada dalam kontrak ada dalam fakta integritas pembayarannya pun harus melalui BPKP seandainya BPKP mengatakan ini kemahalan dan sudah terlanjur dibayar maka penyedia barang wajib mengembalikan kepada pemerintah pada negara dan itu sudah terjadi.

Jadi dari awal Bapak Ibu semuanya kami ini berusaha semaksimal mungkin untuk membuka diri mengundang BPKP, mengundang LKPP, mengundang Kejaksaan, mengundang Bareskrim untuk mengawasi apa yang dikerjakan oleh Satgas dalam mengelola keuangan negara. Kalau toh mestinya ada pertemuan maka akan segera kami proses akan segera kami tindak lanjuti sekarang kami masih dalam proses menindaklanjuti temuan dari BPKP.

Nanti pada akhirnya BPKP akan menentukan berapa besar barang-barang yang tidak bisa digunakan setelah seluruhnya selesai dan berakhir jadi sekarang ini masih berjalan ibarat kita menuju ke Surabaya sekarang ini kita masih dalam perjalanan di Semarang katakanlah begitu.

Jadi saya diingatkan oleh Ibu Risma saya minta BPKP bukan maunya BPKP jadi saya minta Pak Jadi kalau BPKB merasa dia terlanjur apa maksudnya kok bocor misalnya apa namanya dokumen itu saya bilang anda tidak salah bocorkan saja kalau memang ada kejanggalan lebih baik bocor sekarang daripada nanti setelah sekian tahun saya dipanggil KPK saya bilang.

Jadi saya berterima kasih pada BPKP yang menemukan temuan itu supaya apa supaya bisa kita perbaiki sebagian barang-barang yang sudah dikembalikan sudah didistribusi kepada lab yang memerlukan. Jadi mohon berkenan Bapak Ibu sekalian memang apa namanya ya berita seperti itu dan sebenarnya kami sudah menawarkan juga kepada media silakan media berkantor di BNPB silakan *ploroti* apa yang kami kerjakan. Termasuk juga

LSM kalau memang ada yang pengen tahu silakan datang BNPB berkantor BNPB. Saya sampai hari ini masih berkantor dan tidur di BNPB masih tidur Pak walaupun sudah terkena Covid Pak kata Pak Moekhlas harus tetap semangat.

Kemudian rumah sakit Wisma Atlet ini pembagian kewenangan antara Kemenkes dengan BNPB. Jadi sejak diresmikan Bapak Presiden pada tanggal 23 Maret tahun 2020 BNPB membangun sebuah manajemen untuk pengelolaan Wisma Atlet di situ terletak begitu banyak dokter hampir 3000 orang dokter yang berada di Wisma Atlet.

Kemudian honor untuk para dokter ini dan juga tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan. Jadi bukan dokter saja itu jumlahnya hampir 3000 orang dan honor mereka ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan.

Adapun operasional seperti laundry kemudian catering kemudian listrik, AC, internet, semua itu mereka ajukan kepada BNPB dan kami memberikan sebuah konsep agar warga masyarakat kita itu nyaman di rawat di rumah sakit Wisma Atlet, karena apa? Ini Rumah sakit kebanggaan bangsa kita Pak, jumlah pasien bisa ditampung lebih dari 10.000 orang belum ada rumah sakit di Asia Tenggara yang mampu menampung pasien dengan jumlah segitu banyak ketika terjadi puncak kasus Covid pada periode September setelah libur panjang pada bulan Agustus rumah sakit Wisma Atlet itu nyaris penuh Pak. Termasuk Jakarta nyaris penuh padahal pemerintah DKI sudah menambah ruang isolasi dan ICU tetapi karena peningkatan kasus yang tinggi maka itupun mulai ada kuwalahan.

Sempat kita dengar ada istilah PSBB ketat yang di tetapkan pada tanggal 9 September itu ya kami lakukan adalah bagaimana menekan kasus sehingga pada bulan Oktober kasus mulai turun Pak yang dari 65.000 kasus aktif turun ke posisi sekitar 49.000 kasus aktif. sehingga rumah sakit darurat Wisma Atlet pasien itu berada pada posisi 30% untuk ruang isolasi dan 17% untuk ruang ICU Pak.

Itulah kami katakan para dokter dan tenaga kesehatan wajib untuk beristirahat tetapi setelah bulan Oktober, November habis itu libur panjang Natal dan Tahun Baru kasus meningkat pesat sekali dua kali lipat. Sampai akhirnya puncaknya berada pada bulan Januari dan Februari yaitu 176.000 kasus aktif hampir rumah sakit di pulau Jawa penuh Pak termasuk Jakarta, Banten.

Tetapi pemerintah Bapak Presiden mengambil keputusan cepat menetapkan PPKN mikro dengan PPKB mikro ini adalah melibatkan seluruh komponen masyarakat ujung tombaknya adalah kepala desa. Karena sistem pemerintahan desa inilah yang paling efektif termasuk kelurahan lurah dan juga kepala desa yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik mereka melibatkan ketua RT dan juga ketua RW serta tokoh-tokoh masyarakat termasuk PKK, Karang Taruna, LSM, Relawan dan semuanya. Nah gerakan inilah yang akhirnya membantu terjadinya kesadaran masyarakat untuk perubahan perilaku kepatuhan masyarakat setelah adanya PPKM mikro mengalami peningkatan Bapak Ibu semuanya.

Jadi kalau sekarang kasus aktifnya turun sekarang rumah sakit sudah di bawah 60% bahkan ada yang di bawah 40% kita bersyukur. Tetapi apakah bisa seperti ini terus belum tentu ketika nanti kendor ketika nanti lengah bisa jadi bertambah lagi. Yang disampaikan Bapak Ibu semua tadi bahwa walaupun sudah ada vaksinasi bukan berarti kegiatan untuk mematuhi produk kesehatan itu kita kurangi tidak boleh masih banyak peluang kita terpapar Covid. Saya adalah orang yang sangat disiplin menjaga protokol kesehatan. Saya tidak pernah melepas masker saya bahkan bersama Bu Risma tidur di kediamannya Gubernur Sulawesi Barat, saya tidur menggunakan masker tapi tetap kena Covid.

Jadi jangan cuma 1 jam Pak 1 menit saja kita lengah kita bisa terpapar Covid. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya kampanye tentang perubahan perilaku tidak boleh berhenti patuh kepada protokol kesehatan harus selalu kita gunakan. Oleh karenanya kalau tadi ada pertanyaan anggaran komunikasi publik anggaran perubahan perilaku itu besar lebih baik kita mengeluarkan anggaran untuk komunikasi publik dan perubahan perilaku yang besar supaya ada perubahan perilaku masyarakat agar disiplin karena 17% warga negara kita masih ada yang tidak percaya Covid. Masih menganggap Covid ini rekayasa konspirasi. Ini adalah kewajiban kita semua untuk melakukan berbagai langkah agar masyarakat sadar bahwa Covid ini sangat mematikan Covid ini sangat berbahaya.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Sedikit Pak Doni saya ingat anggaran komunikasi publik sedikit mau tanya kenapa terlalu banyak di TV-TV. Setiap jalan itu gambar Pak Doni itu maksudnya apa mau nyalon atau apa itu Pak, apakah itu anggaran komunikasinya dari situ begitu? Saya mau jawaban Bapak itu.

KEPALA BNPB:

Saya tidak tahu Pak kalau mereka menayangkan ada foto saya video saya karena kita tidak pernah membayar secara langsung untuk program yang sifatnya itu sukarela Pak termasuk di televisi itu tidak bayar Pak. Jadi kalau Bapak melihat dari awal tidak ada Rp1,- pun anggaran pemerintah untuk televisi itu semuanya adalah iklan layanan masyarakat dan saya tidak pernah meminta diri saya untuk ditayangkan di televisi Pak.

KETUA RAPAT :

Dan Pak Doni saya kira masih layaklah kalau foto Pak Doni yang tidak layak itu foto Pak Mukhlis. Itu tidak layak. Lanjut Pak Doni.

KEPALA BNPB:

Jadi mohon maaf Pak saya berusaha Pak untuk tidak ingin tampil Pak. Jadi kalau toh mereka menayangkan ada gambar saya kalau boleh dihapus, hapus saja Pak.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Bukan Pak saya ngelihat pas lewat mau pulang ke Tamrin itu ada layar besar ini kok gambar Pak Doni semua kesana sedikit lagi dekat PI Pak Doni lagi begitu makanya siapa yang bayar begitu, itu apakah dana iklan itu?

KEPALA BNPB :

Jadi anggaran komunikasi publik yang dibayar itu adalah untuk media kerja sama media Pak dan itu bukan bayar iklan Pak. Jadi BNPB Satgas tidak pernah membayar iklan Pak. Jadi kalau iklan layanan masyarakat menayangkan sesuatu itu adalah inisiatif dari media sendiri Pak, kecuali program yang sifatnya jurnalisme, perubahan perilaku yang kami melibatkan sekitar 5.000 lebih wartawan yang bergabung dalam program ini Pak. Kemudian program bersama dengan televisi yang kami bayarkan itupun berlangsung selama 3 bulan Pak. Setelah ini belum ada lagi anggaran dari Pak Dirjen Pak.

Nah sebelum bulan Oktober ada iklan-iklan layanan masyarakat itu sama sekali tidak mengeluarkan biaya pemerintah Pak 0% Pak dan itu karena permintaan dari mereka sendiri dan saya tidak pernah menawarkan diri saya untuk menjadi bintang iklan Pak

Yang terakhir masalah IDRIP Pak. Jadi ini upaya kami bersama dengan BMKG Pak. Yang pertama adalah berhubungan dengan bagaimana BMKG menjadi mata dan telinga bangsa kita dalam kebencanaan membangun early warning sistem multi hazard dan *early warning system* dan kami serahkan semuanya kepada BMKG. Dan kami juga sudah mengusulkan kepada beberapa Menku bahwa yang berhubungan dengan prediksi ancaman bencana sebaiknya memang satu pintu BMKG terutama menyangkut masalah teknologi. Apakah itu? Apa namanya jenis alat teknologi yang berhubungan dengan untuk pendeteksian gunung api, gempa, tsunami semua di sana.

Adapun BNPB-nya lebih kepada peningkatan SDM untuk melatih warga masyarakat kita terutama di daerah-daerah yang punya resiko tsunami gempa dan tsunami pantai barat Sumatera Selatan Jawa sejumlah wilayah di Sulawesi dan Maluku, Maluku Utara. Jadi daerah kita ini yang tadi sebutkan berada pada dua subduksi Indo Australia dan Euroasia terdapat patan Pacific yang setiap saat bisa terjadi gempa dan diikuti dengan tsunami kalau kita tidak siapkan masyarakat Pak suatu saat kelak seperti yang di Aceh. Salah satu penelitian Profesor Ron Haris yang melakukan penelitian pada tahun 2002 dia merasa sangat menyesal karena apa yang menjadi temuan dia tidak dipublikasikan secara maksimal sehingga pada tahun 2004 terjadi gempa dan

tsunami di Aceh. Dan kami pun hari ini kami bersama dengan beberapa perwakilan dari kementerian/lembaga langkah pertama kami kemarin pada bulan pada tahun 2019 yang lalu adalah menyusuri pantai selatan pulau Jawa dari Banyuwangi sampai ke Banten dan hari ini Alhamdulillah masyarakat yang sudah mendapatkan pelatihan masih melanjutkan program-program untuk pelatihan simulasi karena mereka sadar bahwa bagian selatan pulau Jawa pernah berulang kali terjadi gempa dan tsunami seperti Banyuwangi - Pangandaran.

Dalam waktu dekat ini kami juga akan membantu wilayah Jawa Tengah terutama Cilacap. Kalau Cilacap ini dihantam gelombang tsunami dari selatan itu aman karena ada Nusakambangan seperti yang terjadi pada saat tsunami tahun 2006 di Pangandaran Cilacap aman karena ada Nusakambangan.

Staf kami Dokter Abdul Muhari yang waktu itu masih bertugas di Kementerian KKP melakukan penelitian ditemukan tinggi gelombang di Nusa Kambangan mencapai 16 meter itu dari patahan pohon yang ditemukan, bagaimana seandainya Pantai Selatan Jawa Timur sampai ke Yogyakarta mengalami guncangan? Maka wilayah Cilacap itu tidak ada benteng sama sekali tidak ada. Benteng alam tidak ada, pohon tidak ada, pohon sementara di Cilacap ini punya banyak apa namanya kilang minyak jadi bisa terjadi tsunami. Artinya ada tsunami ada air tetapi terjadi kebakaran kota dan ini semuanya harus masuk dan rencana kita untuk jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang kalau kita memang betul-betul serius untuk bisa melindungi warga negara kita.

Demikian Terima kasih kami kembalikan.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Dirjen Anggaran silakan kalau nanti mau kita perdalam ada Raker dengan Pak BNPB. Kalau ini khusus masalah *mandatory budging* masalahnya silakan Pak Dirjen Anggaran.

ISA RACHMATAWARTA (KEMENTERIAN KEUANGAN):

Baik terima kasih.

Bapak Ketua Komisi VIII, Ibu-ibu Bapak-bapak yang kami hormati.

Secara ringkas ada empat hal yang ingin kami respons. Yang pertama tadi penjelasannya sudah disampaikan dengan baik sekali oleh Bapak Kepala BNPB bahwa intinya memang kita harus melibatkan atau membangun suatu sistem yang melibatkan berbagai pihak tidak hanya pemerintah pusat pemerintah daerah bahkan swasta sekalipun tadi respon Bapak Kepala BNPB mengenai layanan iklan layanan masyarakat yang secara sukarela dilakukan oleh pres ataupun media-media itu adalah salah satu bukti bahwa sebetulnya swastapun berkeinginan dan berkehendak untuk ikut membantu dalam membangun sistem yang baik tersebut. Ini yang memang harus di bangun

secara lebih sistematis tidak boleh kemudian dibiarkan sebagai sepatu spontanitas pada saat bencana sudah terjadi ini yang mungkin harus menjadi bagian dari RUU Penanggulangan Bencana tersebut.

Yang kedua adalah sistem ini juga harus melibatkan tindakan yang preventif tadi berbagai penjelasan yang disampaikan mulai dari edukasi kemudian bagaimana sebetulnya isu dari bencana banjir itu bukan sekedar curah hujan tetapi juga pendangkalan sungai yang harus diantisipasi sebelum hujan itu sendiri datang dan sebagainya ini yang memang tidak membuat tidak sesederhana menyiapkan respon terhadap bencana itu sendiri ini yang seharusnya menjadi bagian dari sistem yang akan kita bangun.

Juga demikian juga misalnya ataupersyaratan untuk bangunan kita tahu daerah-daerah tertentu memang sangat rentan terhadap bencana gempa. Tapi kemudian penegakan ketentuan mengenai persyaratan serta kekuatan dan ketahanan bangunan tidak benar-benar kita terapkan. Ini lagi-lagi juga merupakan tindakan preventif yang memang tidak wilayahnya Kemensos atau bukan BNPB tapi ini harus menjadi bagian dari kesadaran bersama.

Yang ketiga adalah mengenai konsep pendanaan yang prabencana ini sebetulnya tadi disampaikan oleh Pak Iskan Qolba tapi beliaunya tidak ada ya hari ini? Tapi intinya kami sampaikan bahwa itu ada di dalam respon kami di dalam tim terhadap RUU Penanggulangan Bencana. Kalau kemudian detailnya nanti di inginkan untuk dibahas kami siap untuk melakukan hal tersebut bersama Komisi VIII.

Yang terakhir masalah akuntabilitas ini dalam penyikapan terhadap bencana inikan seringkali harus memang harus serba cepat dan dananya juga melibatkan dana yang besar tapi pada akhirnya akuntabilitas harus tetap kita jaga. Karena itu verifikasi oleh BPKP dan sebagainya itu adalah bagian dari untuk mewujudkan akuntabilitas tidak bisa kita tinggalkan begitu saja atau pada akhirnya kita semua ingin selamat dunia dan akhirat tidak ada yang mempertanyakan apa yang kita lakukan tadi. Transparansi menjadi salah satu bagian yang disampaikan oleh Ibu Mensos maupun Kepala BNPB tapi pada akhirnya kita tidak cukup mengatakan diri kita sudah terbuka. Kita harus juga siap memang ada pihak yang independen yang objektif memverifikasi apa yang kita lakukan dan kalau yang perlu kita lakukan mungkin adalah menata kembali sebetulnya verifikasi itu prosesnya bagaimana dokumen apa yang harus di siapkan dan sebagainya agar proses tidak dianggap menjadi satu beban administratif yang berkepanjangan itu yang mungkin harus kita perbaiki, kalau bisa disederhanakan tentu akan lebih baik.

Demikian Bapak Pimpinan Ibu Bapak Anggota Komisi VIII yang kami hormati kami serahkan kembali, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan yang pasti komentar terakhir tadi merespons dari Rp1.3Triliun yang diajukan oleh BNPB Pak ya terhadap revisi PMK nomor 127 tahun 2020.

Baik Bapak-Ibu kita akan masuk pada kesimpulan mohon ditayangkan nanti Bu Menteri, Pak Kepala BNPB, dan Pak Dirjen serta seluruh Anggota dan Pimpinan saya akan membacakan draf kesimpulan mohon dilihat bilamana perlu ada perbaikan redaksi maupun makna nanti akan kami berikan kesempatan pada masing-masing pihak.

Draf Kesimpulan
Rapat Kerja Gabungan Komisi VII DPR RI
dengan
Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Masa Persidangan IV
Tahun Sidang 2020-2021
Selasa 16 Maret 2001

Pada rapat kerja gabungan antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana dengan agenda membahas anggaran penanggulangan bencana disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial Republik Indonesia Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dan Kepala BNPB merumuskan mengenai *mandatory budgeting* sebesar 2% dalam APBN dan APBD untuk penanggulangan bencana sebagaimana rumusan dalam rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Badan Nasional Penganggulangan Bencana untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsinya serta anggaran yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
3. Komisi VIII DR RI meminta Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk membuat skema anggaran penanggulangan bencana secara menyeluruh dan terpadu pada saat pra bencana darurat bencana dan pasca bencana. Ini sebagaimana yang dijelaskan Pak dirjen tadi banjir itu tidak tiba-tiba mungkin pranya kita bisa melakukan pengerukan sungai usul dari Bu Menteri mungkin pra bencana begitu Pak skema anggarannya kita maksud ini.
4. Komisi VIII DPR RI mendorong BNPB untuk menggunakan dana siap pakai secara efisien, transparan dan akuntabel serta diperuntukkan bagi penanganan bencana kementerian dan lembaga.
5. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial kepala BNPB dan Kementerian Keuangan RI untuk menindaklanjuti pandangan pendapat dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII sebagai berikut:

- a. Mendorong anggaran yang memadai dalam rangka memastikan pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar korban bencana ini mungkin arahnya ke refocusing ini Bu Menteri.
- b. Memperkuat kearifan lokal dan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana.
- c. Memastikan kebutuhan anggaran dan peralatan penanggulangan bencana sesuai kebutuhan dan mengantisipasi timbulnya kerugian negara. Pertama mungkin dari pihak sekretariat redaksinya tolong dikonsistenkan saja kalau mulai dari Menteri Sosial Menteri Keuangan ke bawahnya juga begitu.

Silakan dari Anggota ada yang perlu di cermati atau dirubah? Cukup dari meja Pimpinan silakan Bu menteri.

MENTERI SOSIAL :

Cukup Bapak cukup, Yang poin a menyiapkan anggaran yang memadai.

KETUA RAPAT :

Angka 5 huruf a Bu menyiapkan anggaran mendorong malah tidak dapat anggaran, anggarannya loncat kemana? Ini usulan Pak Moekhlas Bu sering mendorong-dorong ada lagi Bu Menteri.

Karena begini Bu Menteri kita ini sebenarnya tadi yang banyak disampaikan dari Sabang sampai Merauke kita belum pernah menyampaikan secara terbuka butuh dana berapa ini prabencana, darurat bencana pasca bencana betulkan Pak Doni? Pak Doni mengusulkan kalau ada bencana baru mengusulkan kita belum pernah apa namanya meneropong Bu. Sebenarnya bencananya jenis apa berapa banyak kira-kira bagaimana prabencananya darurat bencananya belum pernah Bu makanya kira-kira 2% masuk akal atau tidak ini. Maksud kami Bu makanya penting Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan BNPB itu membuat semacam analisa global sebenarnya kita ini dari supermarket bencana ini persiapan dana itu berapa sehingga tadi APBD-nya berapa dari pusat berapa itu mungkin yang perlu kita nanti bahas secara khusus baik dari sisi wewenang maupun anggaran di revisi Undang-Undang Nomor 24 ini Bu.

WAKIL KETUA KOMISI VIII/F- PDI PERJUANGAN (DIAH PITALOKA, S. Sos. M.Si.):

Jadi yang ada saja sekarang misalnya pengerukan sungai itu orang bertahun-tahun bingung mengatasi banjir tidak bisa melakukan pengerukan sungai. Nah tahun berikutnya jalan rusak lagi rumah terendam lagi itu sebetulnya kerugiannya bisa jadi lebih besar dari apabila kita menyiapkan anggaran.

KETUA RAPAT:

Misalnya kita mengeruk sungai biayanya tidak terlalu besar dibandingkan korban banjir itu nah ini kira-kira tidak menghitung Pak Dony ini mungkin mitigasinya dan sebagai perlu kita benar-benar komprehensif kita melihat bencana yang ada di Indonesia ini.

WAKIL KETUA KOMISI VIII/F- PDI PERJUANGAN (DIAH PITALOKA, S. Sos. M.Si.) :

Kita lihat di Jawa Utara itu kemarinkan, itukan sebetulnya problemnya hari ini sudah ada begitu tapi kita tidak pernah memikirkan kecuali selesai ngurusin korban minggu depannya kembali lagi sudah kering, selesai. Padahal persoalan itu tahun depan akan muncul lagi sayang sekali saya sekali saya lihat jalan baru itu di Utara Jawa itu sayang sekali rusak infrastruktur gara-gara banjir. Nah itu menghitung kita tidak mengeluarkan uang tapi kita tidak pernah menghitung kerugian ini yang menurut saya nanti begitu ngantre bikin jalan panjang lagi antre anggarannya kasihan Pak daerah Pak.

KETUA RAPAT:

Itu mungkin Bu Menteri sama Kepala BNPB dan Dirjen Keuangan sehingga kita memandang bencana di Indonesia itu betul-betul komprehensif Pak bukan parsial begitu ya tiba bencana tiba akal kita juga tidak mau seperti itu ya kalau lancar. Tapi kalau misalkan tidak lancar usulannya kemudian birokrasi yang berbelit-belit ya tentu yang korban rakyat juga Bu.

Nah ini kita ingin dalam revisi undang-undang ini koordinasinya kita tingkatkan anggarannya betul-betul kita hitung kewenangannya. Kita perjelas itu mimpi dari DPR terhadap revisi Undang-Undang Nomor 24 ini maka nomor satu itu kita cantumkan di secara khusus. Baik dari anggota ada Bu Ina.

F- PDI PERJUANGAN (INA AMMANIA):

Pak Ketua tadi untuk meng-inventory masalah tentunya saya menyarankan untuk normalisasi kan pasti bisa di apa namanya di sisir berapa sungai yang ada di Indonesia yang kecenderungannya untuk mengakibatkan banjir. Nah oleh sebab itu kalau normalisasi pasti nanti keluar angka begitu tadi di dalam rapat ini saya belum mendengar itu semua itu saja saran saya.

KETUA RAPAT:

Kalau normalisasi sungai biasanya ada balai besar sungai dan apakah itu kalau di itu PUPR itu nanti kalau Bu Ina mau lebih jelas bisa kita rapat dengan Menteri PU Bu, silakan Pak Dirjen Anggaran.

ISA RACHMATAWARTA (KEMENTERIAN KEUANGAN):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan saya sependapat dengan Bu Ina bahwa kita belum membahas sama sekali mengenai angka-angka disini tadi. Jadi kesimpulan di nomor 1 kami mohon dapat diperbaiki kita yang sifatnya lebih generic. Misalnya untuk merumuskan dukungan kolaboratif APBN dan APBD tanpa menyebut mandatory spending ataupun angka 2% itu tadi ini akan menjadi bagian dari diskusi kita di dalam membahas RUU penanggulangan bencana itu sendiri.

Saya pikir akan lebih tepat lagi kalau boleh diusulkan adalah merumuskan mengenai dukungan kolaboratif APBN dan APBD untuk penanggulangan bencana dan seterusnya demikian Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Dirjen Pak Isa jadi kenapa kita cantumkan sebesar 2% kini ada di draf undang-undang. Makanya ini mau kita kaji layak tidak kita pertahankan angka 2% Pak. Kalau misalkan menurut kajian tidak layak atau tadi sifatnya kolaboratif itu mungkin hasil akhir Pak tapi di draf undang-undang atas inisiatif DPR belum diubah masih ada di draf undang-undangnya Pak angka 2% ini ada Pak. Kita tulis ini supaya tadi dikaji oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial dan BNPB supaya ini komprehensif Pak nanti baru kita bahas dipanja setelah dapat kajian dari Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial dan BNPB.

ISA RACHMATAWARTA (KEMENTERIAN KEUANGAN):

Kalau kita pakai kata mengkaji setuju boleh tapi tidak merumuskan karena di Dim kami, kami sudah merespon Pak mengkaji mengenai.

KETUA RAPAT:

Untuk mengkaji merumuskan di ganti yang mengkaji mengkaji.

WAKIL KETUA KOMISI VIII/F- PDI PERJUANGAN (DIAH PITALOKA, S. Sos. M.Si.):

Kitakan harus memutuskan undang-undangnya kapan kajian itu selesai kalau mengkaji tapi ada hasil untuk kita merumuskan undang-undang. Oke karena berhubungan dengan waktu Pak kalau kita mengkaji 2 tahun ya tidak keburu undang-undangnya sudah keburu diketok.

ISA RACHMATAWARTA (KEMENTERIAN KEUANGAN):

Kan tinggal Ibu memutuskan kapan akan mulai membangun Dim itu

KETUA RAPAT:

Intinya begini Pak Dirjen Anggaran kita mau dapat gambaran Pak jadi angka yang kami cantumkan di usulan kami di inisiatif DPR itu. Tentu kami punya alasan dan yang merespons kan pemerintahan karena ini yang membuat Dim pemerintah sebaiknya tidak salah dalam ketuk palu di paripurna nanti Pak beitu Pak.

Jadi gantijan mengkaji oke mengkaji, mengkaji, dan merumuskan. Mengkaji dan menelaah mengkaji saja ya? Karena ini DIM di pemerintah masalahnya ini. Oke baik.

ISA RACHMATAWARTA (KEMENTERIAN KEUANGAN):

Saya mohon juga Bapak Pimpinan tadi ide untuk berkomunikasi dengan Pimpinan daerah diperlukan karena beberapa Pemda betul-betul tidak punya anggaran bukan hanya untuk bencana. Bahkan dia tidak punya apa istilah Bu Mensos pendapatan asli daerah PAD begitu Jadi kalau diwajibkan menganggarkan 2% dan sebagian dari mana itu 2% nya itu juga menjadi jadi mohon itu dilakukan.

MENTERI SOSIAL:

Mungkin bukan daerah. Tapi provinsi agak kapasitas keuangannya agak lebih besar kalau daerah mungkin kapasitas keuangannya memang minim.

KETUA RAPAT:

Tapi semangatnya sebetulnya begini kita ini bencanaankan banyak sekali mungkin Kabupaten mana yang tidak ada bencana ya kan? Nyaris ada tinggal jenisnya kan Pak Doni. Nah faktanya setiap ada bencana mintanya ke pusat Pak mereka lepas tangan mana mereka cepat-cepat kalau ada korban itu pusat tidak pecus tidak bantu kami nah ini kita tidak mau Pak.

Makanya tadi saya minta ke tadi kita memandang bencana secara komprehensif Pak dari Sabang sampai Merauke. Nah ini mungkin tidak ada Bu Risma yang tidak ada bencana itu tidak ada pasti semua jenis ada mau puting beliung mau banjir mau longsor mau apa namanya ya gempa mau tsunami ada semua di Indonesia ini.

Nah kalau misalkan ada daerah yang memang sama sekali tidak menganggarkan bencana Bu kita juga tidak tahu bencana itu kapan datang. Nah ini mungkin semangat kami mencantumkan pelibatan penguatan

lembaga di daerah sama pelibatan *mandatory budgeting* di APBD itu sebenarnya Bu biar kita ini sama nafas kita ini bahwa bencana itu adalah tanggung jawab kita semua. Tapi usul dari Pak Dirjen tadi saya setuju kita buat dalam satu kesimpulan Komisi VIII dan ini tadi sepakat untuk mengundang atau mendengar usul pendapat dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota nanti apa namanya yang diundang siapa kita tentukan.

Masih ada Pak Dirjen atau Bu Menteri Pak Doni cukup ya dimana nanti kita dengar dari daerah yang minus anggaran Pak Dirjen ya dari yang banyak anggarannya sama dari yang sedang anggarannya nanti kita lihat dari tiga kondisi itu.

Baik Bapak Ibu setelah kita baca draf kesimpulan dan sudah banyak mengalami perubahan redaksi maupun makna saya tidak akan membacakan lagi hasil perbaikan. Maka saya tanya kepada Bu Menteri, Pak Kepala BNPB dan Pak Dirjen Anggaran beserta seluruh Anggota dan Pimpinan apakah draf kesimpulan rapat kerja gabungan yang sudah saya bacakan mengalami perubahan dan perbaikan apakah bisa kita setuju sebagai sebuah kesimpulan rapat kerja hari ini? Setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Baik Bu Menteri sebelum ditutup kami persilakan mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bu Menteri kami persilakan.

MENTERI SOSIAL:

Terima kasih kepada Pimpinan Ketua dan Pimpinan serta Anggota Komisi VIII beserta Pak Doni dan dari Kementerian Keuangan Insya Allah pada pada dasarnya bahwa kami tidak ada niat apapun Pak apalagi ini anggaran bencana saya juga sama-sama. Saya ke BPKB kenapa saya tahu saya ke BPKB minta saya di audit untuk anggaran bencana ternyata BPKB menyampaikan Bu Risma kok samaan dengan Pak Doni, Pak Doni minta juga di audit. Jadi kenapa saya tahu itu karena memang saya juga meminta untuk audit itu seperti itu kira-kira matur nuwun Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Doni.

KEPALA BNPB:

Terima kasih Pimpinan kami menyampaikan terima kasih apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI yang telah melakukan inisiatif untuk merevisi Undang-undang kebencanaan karena memang kita butuh sekali sebuah payung hukum agar kita mampu

mengurangi resiko karena setiap tahun korban yang terjadi itu jumlahnya banyak sekali kerugian harta benda juga sangat besar sekali dan tahun 2018 kita pernah mendapatkan predikat sebagai negara dengan korban jiwa terbanyak akibat bencana yaitu NTB dan Palu.

Tahun 2015 kita mendapatkan catatan sebagai negara yang mengeksport asap tapi 2019 kita relatif lebih baik. Bahkan kita pernah mengirimkan pasukan untuk membantu negara tetangga dalam karhutla dan tentunya kemampuan kita di bidang kebencanaan harus semakin baik termasuk juga revisi ini kita harapkan bisa melibatkan TNI dan Polri agar kualitas penanganan kebencanaan itu bisa semakin baik sehingga akan bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa warga negara kita.

Demikian, sekali lagi terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kepala BNPB terakhir Pak Dirjen Anggaran.

ISA RACHMATAWARTA (KEMENTERIAN KEUANGAN):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak Pimpinan Komisi VIII, Ibu Bapak Wakil Ketua, Ibu Bapak Anggota yang kami hormati.

Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan-pandangan Kementerian Keuangan di dalam membangun skema anggaran untuk penanggulangan bencana yang lebih baik. Terima kasih juga untuk Ibu Menteri Sosial dan Kepala BNPB terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Ibu Menteri Sosial Pak Kepala BNPB dan Pak Dirjen Anggaran Bapak Ibu Pimpinan dengan demikian berakhirlah rapat gabungan pada hari ini. Semoga apa yang kita hasilkan Insya Allah demi merah putih perbaikan di masa yang akan datang dan revisi Undang-Undang Nomor 24 2027. Ini Insya Allah kita selesaikan dalam masa sidang ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan sehingga payung hukum tentang kebencanaan segera kita hadirkan untuk menangani semua bencana yang ada di Republik Indonesia ini. Terima kasih dengan mengucapkan *Alhamdulillah*. Rapat ini saya nyatakan ditutup terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

RAPAT DITUTUP PUKUL 17.05 WIB

**Jakarta, 16 Maret 2021
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
NIP. 197309261997031001**